

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS

H. MURSYIDAH AMINY, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199703 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Kinerja sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis/ kinerja utama organisasi. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian Kinerja Utama Eselon II, III dan IV di Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait urusan perumahan dan permukiman pada Tahun 2024. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan di masa yang akan datang, Amin.

Banjarbaru, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS

MURSYIDAH AMINY, M.T.
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19660330 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi Indonesia yang mulai stabil setelah pandemi Covid-19 berimbas kepada ekonomi daerah yang pada akhirnya berpengaruh juga kepada struktur APBD. Menindaklanjuti hal tersebut, refocusing dan realokasi Anggaran dilakukan guna memaksimalkan capaian kinerja Organisasi dengan memperhatikan arahan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada awal Tahun Anggaran mendapatkan alokasi Anggaran sebesar 71,58 milyar setelah refocusing dan realokasi anggaran namun terdapat penambahan pagu anggaran di anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan berubah menjadi 108,4 milyar.

Bentuk kerja keras Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Tahun 2024 dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan diukur dan didapat dari 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan komitmen Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk Tahun 2024, Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mendukung Sasaran Strategis Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencapai predikat sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 102,7%, yang didapat dari rata-rata capaian indikator kinerja Utama Tahun 2024 Sasaran Strategis RPJMD yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Persentase penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 62,43%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase serapan anggaran Tahun 2023 yang mencapai 93,81%. Hal ini terjadi dikarenakan tambahan pagu saat perubahan 2024 tidak bisa diserap maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan periode perubahan yang terlalu singkat dan adanya kebijakan terkait pengadaan jasa konstruksi melalui e-katalog yang ditangguhkan sehingga paket pekerjaan yang nilainya cukup besar tidak bisa dilaksanakan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
1. Dasar Hukum Pembentukan	2
2. Tugas Pokok	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis SKPD	6
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	9
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Tujuan & Sasaran Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
1. Perjanjian Kinerja Esselon II dengan Gubernur Kalimantan Selatan	13
2. Perjanjian Kinerja Esselon III dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	15
3. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	16
4. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Perumahan	18
5. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	20
6. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Prasana, Sarana dan Utilitas Permukiman	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	24
1. Sasaran RPJMD	24
2. Eselon II (Kepala Dinas)	37
3. Eselon III (Sekretaris)	49
4. Eselon III (Kepala Bidang Perumahan)	71

5. Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman)	85
6. Eselon III (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman) .	98
B. Akuntabilitas Keuangan	112
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024.....	112
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	112
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2023 dan 2024	113
4. Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan.....	128
5. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	130
BAB IV PENUTUP	132
A. Simpulan.....	132
B. Strategi Peningkatan Kinerja	133
LAMPIRAN	

Critical Succes Factor (SF) dan Cascading Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2023 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perencanaan strategis. Rencana Strategis tersebut disusun berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pelaksanaan Rencana Strategis ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban beban tugas yang telah ditetapkan dan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja serta untuk memberikan gambaran secara tertulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setiap tahun anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan nomor 239/IX/6/2003 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan hasil pengukuran sasaran strategis program/ kegiatan tahun 2021 berdasarkan parameter indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja terpilih dari beberapa keluaran (output) dan atau hasil (outcome) maupun indikator masukan (input). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan agar terlihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan dalam melaksanakan/ menggunakan anggaran keuangan khususnya dana yang bersumber dari APBD Provinsi dalam urusan perumahan dan permukiman.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

1. Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan, pengembangan permukiman serta prasarana, sarana & utilitas permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Pasal 28H Hak Asasi Manusia : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan". Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan, yang antara lain meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 11) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
- 12) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2017.

2. Tugas Pokok

- 1) Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan, pengembangan permukiman serta prasarana, sarana & utilitas permukiman sebagai berikut :

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah;
- c. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Teknis di Bidang Permukiman dan kawasan permukiman dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Permukiman dan kawasan permukiman;

- e. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat;
 - f. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman;
 - g. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat;
 - h. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Membina, Mengawasi dan Mengevaluasi Pengelolaan Kesekretariatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Bidang, Tugas dan Tanggung Jawabnya.
- 2) Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

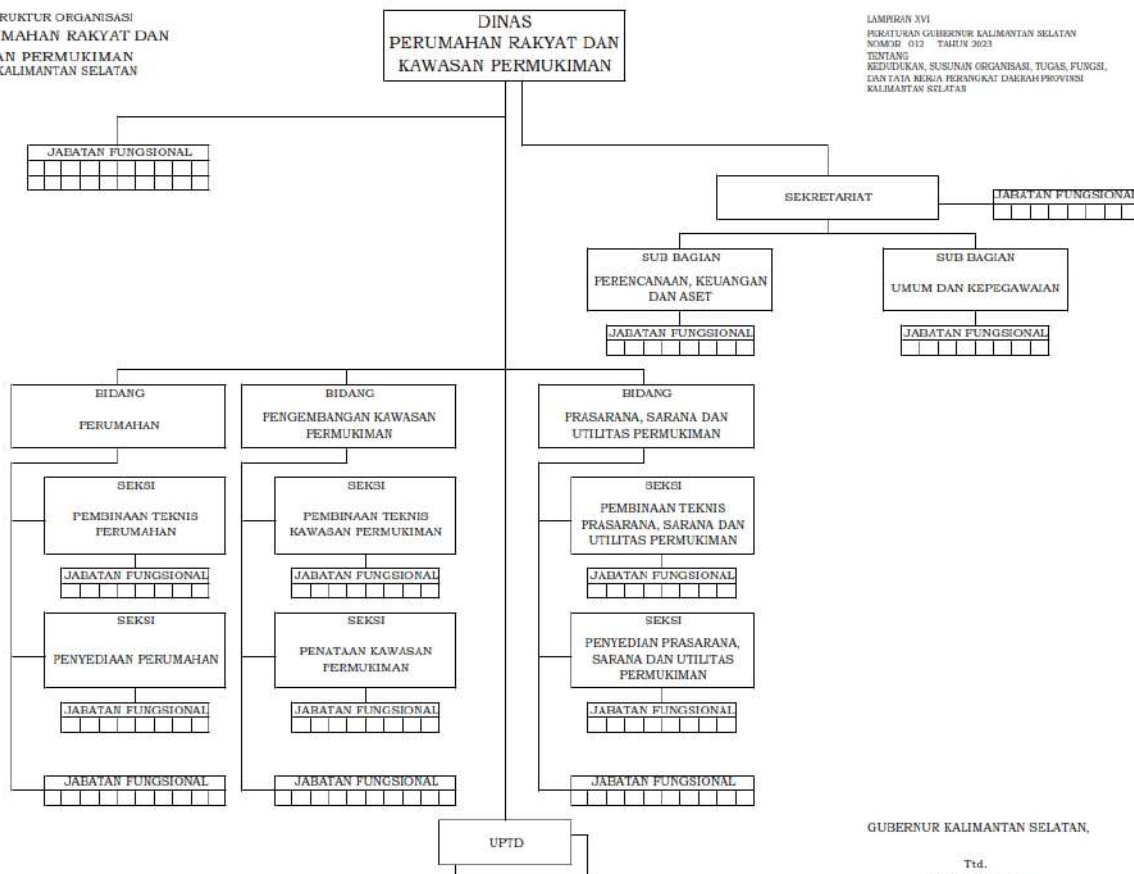
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Permukiman dan kawasan permukiman dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman;
- e. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan Pengelolaan Kegiatan Kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Bagan I.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN MOOR

Bagan I.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

D. Isu Strategis SKPD

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dasar penentuan sasaran strategis yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Berikut isu-isu strategis yang dihadapi :

1. Tingginya angka backlog penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Selatan
3. Belum optimalnya data jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni

4. Belum optimalnya data warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
5. Belum optimalnya data pencapaian SPM Perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
7. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta sistem pembiayaan perumahan
8. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
9. Masih tingginya luasan kawasan permukiman kumuh khususnya kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (10-15 Ha)
10. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di perumahan dan permukiman yang masih memerlukan perhatian dan percepatan penanganannya
11. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar SKPD ataupun stakeholder terkait dalam penanganan PSU perumahan & permukiman yang layak, serta peningkatan/penataan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan
12. Penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum serta penataan kawasan permukiman kumuh belum optimal menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's), seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses air minum dan sanitasi dasar.
13. Penanganan Infrastruktur dasar dan penanganan PSU permukiman yang menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) masih secara parsial dan belum terpadu
14. Terbatasnya pendanaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan baik melalui dana APBD, APBN maupun CSR

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, tugas pokok

dan fungsi organisasi serta penjabaran tugas pokok fungsi urusan perumahan dan permukiman .

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi uraian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan tentang analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan sebagai pertanggungjawaban Kinerja tahun 2023.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan hasil menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

P

erumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, pemenuhan prasarana dan sarana utilitas di perumahan serta kualitas permukiman yang masih rendah dilihat dari besarnya luasan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, permasalahan penyediaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah juga harus dituntaskan karena ini merupakan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam urusan perumahan dan permukiman.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok dalam urusan perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan maka perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2021 s/d 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Selatan yang terencana dalam Renstra tersebut diwajibkan untuk mencantumkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah yang terpilih, sebagai berikut :

1. Visi

Melihat pada kondisi, potensi, peluang dan tantangan yang ada, maka visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 (lima) tahun Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih ditetapkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2021 – 2026 yaitu :

KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2021 – 2026 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi ‘Terwujudnya Perumahan & Kawasan Permukiman yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan’ yang mendukung dari visi Gubernur Kalimantan Selatan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut di atas, Pemerintah Daerah menetapkan 5 (lima) Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

MISI 1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
MISI 2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
MISI 3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
MISI 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik
MISI 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

1) Pernyataan Misi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Visi dan Misi Kepala Daerah mengemban amanat dalam Misi 3 “Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian” dan Misi 5 “Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana”. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi Dinas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan dan permukiman yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman.
- c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan kualitas perumahan yang terjangkau.
- d. Mempercepat pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang berwawasan dan ramah lingkungan.
- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya saing kemandirian di bidang permukiman serta penyelenggaraan penataan bangunan yang berkelanjutan.
- f. Membangun system koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta system pengawasan.
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat.

Pernyataan visi dan misi Dinas tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan prasarana & sarana perumahan permukiman, yang berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat; berkelanjutan memberi arti konsisten dalam tujuan dan sasaran dan mampu menanggulangi hambatan, bahkan mampu memberi nilai tambah yang layak dalam mengelola lingkungan, yang pada gilirannya mengangkat harkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maju dan unggul.

Alat yang akan dipergunakan dalam mendorong visi tersebut, yakni dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi dan lingkungan melalui pembangunan/pengembangan perumahan dan permukiman yang diwujudkan pada penciptaan lingkungan permukiman yang nyaman, sejuk, serasi, PSU Permukiman yang memadai dan Rumah layak huni.

Pembangunan prasarana & sarana perumahan permukiman merupakan pemberi kontribusi yang cukup besar pada peningkatan angka PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan bidang perumahan dan permukiman dapat berperan sebagai salah satu katup pengaman dalam hal pengurangan angka backlog kepemilikan dan backlog hunian dan pemenuhan hajat akan perumahan yang serasi dan layak huni, Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi serta Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kalimantan Selatan.

Untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki rumah layak huni diperlukan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan permukiman yang layak huni melalui penyediaan prasarana dan sarana umum berupa Jalan, Jaringan Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, Sanitasi, Rumah Ibadah dan Ruang Terbuka Non Hijau.

Pemanfaatan/pengelolaan dan pembinaan secara profesional, menuntut pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk tujuan dimaksud, sehingga dalam mengembangkan potensi daerah terjadi saling bersinergi dengan mengelola sumber daya yang tersedia serta komitmen pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung dan pendorong pembangunan dan dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri secara berkelanjutan.

3. Tujuan & Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis yang harus dicapai terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
Misi 3 - Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Kawasan Permukiman; 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Misi 5 - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Program Pengembangan Perumahan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja 2024 merupakan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024. Adapun sasaran, indikator kinerja dan rencana capaiannya terbagi kedalam Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV.

1. Perjanjian Kinerja Esselon II dengan Gubernur Kalimantan Selatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rumah yang Layak	%	79,61	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

		Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	79,39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Poin	85,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan	Inovasi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rumah yang Layak	%	79,61	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	79,39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Poin	90,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan	Inovasi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2. Perjanjian Kinerja Esselon III dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

1) Sekretaris

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	83,70	Sekretariat
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas	%	93,00	Sekretariat
3.	Peningkatan Kualitas SDM Dinas	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Dinas	%	100,00	Sekretariat
4.	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran Dinas	%	93,00	Sekretariat
		Persentase Aset yang tercatat	%	100,00	Sekretariat

2) Kepala Bidang Perumahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	%	48,02	Bidang Perumahan

3) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	39,19	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Meningkatkan Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	47,66	Bidang PSU Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Meningkatkan Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	48,80	Bidang PSU Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					

1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Dokumen	18	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Dokumen	5	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
		Jumlah Aset yang tercatat	Unit	117	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Dokumen	18	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Dokumen	5	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
		Jumlah Aset yang tercatat	Unit	110	Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dok	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Menyediakan data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	Orang	68	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Perumahan

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan Urusan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	Dokumen	15	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
2.	Menurunkan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	%	10,76	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
3.	Melaksanakan Penyelenggaraan Pembinaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab. / Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan	Kab./Kota	13	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Menganalisa Dokumen Perencanaan/ Kajian Urusan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	Dokumen	15	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
2.	Melakukan Pendataan RTLH secara Berkala	Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
3.	Fasilitasi Sosialisasi Akses dalam Pemenuhan Rumah	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	%	10,76	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan

4.	Melaksanakan Sosialisasi Prosedur Urusan RTLH	Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH	Orang	50	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
----	---	--	-------	----	----------------------------------

2) Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana Prov. Kalsel	Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	750	Seksi Penyediaan Perumahan
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Melaksanakan PKS antara Bank Pemerintah dengan Dinas Perkim untuk Penyaluran Bantuan RTLH	Jumlah PKS yang telah ditindaklanjuti	Dokumen	1	Seksi Penyediaan Perumahan
2.	Fasilitasi Bimtek dan Pendampingan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan RTLH	Jumlah Peserta Bimtek yang Paham dan Mengerti	Orang	50	Seksi Penyediaan Perumahan
3.	Melakukan Verifikasi Bagi Penerima Bantuan PK RTLH	Jumlah Dokumen BNBA yang telah diverifikasi sesuai dengan RC	Dokumen	1	Seksi Penyediaan Perumahan
4.	Melaksanakan peningkatan kualitas RTLH Korban Bencana Provinsi	Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	750	Seksi Penyediaan Perumahan

5. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	Dokumen	7	Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	Kab./Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	Dokumen	12	Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	Kab./Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman

2) Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
-----	---------	-------------------	--------	--------	------------------

Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Melaksanakan Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	Ha	33,40	Seksi Penataan Kawasan Permukiman
2.	Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	115	Seksi Penataan Kawasan Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Melaksanakan Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	Ha	33,60	Seksi Penataan Kawasan Permukiman
2.	Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	115	Seksi Penataan Kawasan Permukiman

6. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Prasana, Sarana dan Utilitas Permukiman

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
-----	---------	-------------------	--------	--------	------------------

Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	Dokumen	9	Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	Kab/Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14	Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	Kab/Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

2) Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Melaksanakan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani	Meter	9.000	Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan

	Provinsi Kalimantan Selatan				Utilitas Permukiman
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan PSU yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	30	Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
Perjanjian Kinerja Perubahan					
1.	Melaksanakan penanganan penangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani	Meter	14.000	Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
2.	Melakukan Pendataan PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan	Jumlah dokumen data PSU Perumahan yang dilakukan serah terima	Dokumen	1	Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis/ Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui perbandingan realisasi dan target serta capaian.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja tiap SKPD, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Predikat	Rentang Capaian	Kategori Capaian
AA	Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	Nilai > 80 - 90	Memuaskan
BB	Nilai > 70 - 80	Sangat Baik
B	Nilai > 60 - 70	Baik
CC	Nilai > 50 - 60	Cukup (Memadai)
C	Nilai > 30 - 50	Kurang
D	Nilai > 0 - 30	Sangat Kurang

1. Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalimantan Selatan yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dan Realisasi Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1 Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Kinerja Utama SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD / PK Gubernur	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	48,02%	52,84%	110,03%
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19%	39,19%	100%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	47,66%	48,04%	100,8%
2	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian					102,7%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah RTLH yang ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total RTLH}} \times 100 \quad (1)$$

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah luasan kawasan kumuh yang telah tertangani hingga Tahun } n}{\text{Jumlah luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100 \quad (2)$$

Persentase Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah Permukiman yang ditangani}}{\text{Jumlah permukiman yang didukung PSU}} \times 100 \quad (3)$$

Persentase Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah Rumah yang ditangani}}{\text{Jumlah Rumah yang harus ditangani}} \times 100 \quad (4)$$

Tabel III.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
					Target RPJMD/ PK Gubernur	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	38,49%	39,47%	45,75%	48,02%	52,84%	110,03%
2.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	26,92%	30,93%	34,97%	39,19%	39,19%	100,00%
3.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	43,93%	45,73%	47,49%	47,66%	48,04%	100,8%
4.	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata – rata capaian						102,7%

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Indikator SKPD

No	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kals el	Kalt eng	Kal- bar	Kal- tim	Kal- tara	Target Nasional	Nasion al	Target SDG's
1.	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	52,84%	-				-		
2.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19%	-				-		
3.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	48,04%	-				-		
4.	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	100%	100%				100%		

1) Perbandingan Realisasi dengan target

a. Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni

Pencapaian indikator Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 52,84% dari target 48.02%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2024 sebesar 110,03%. Indikator ini merupakan indikator positif dimana semakin meningkat angka capaiannya maka semakin banyak Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 39,19% dari target 39,19%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2024 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif, dimana semakin meningkat angka capaiannya

maka semakin baik pula kondisi kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Pencapaian indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman terealisasi sebesar 48,04% dari target 47,66%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2024 sebesar 100,8%. Indikator ini merupakan indikator positif dimana semakin meningkat angka capaiannya maka semakin meningkat kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 100% dari target 100%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2024 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif dimana semakin meningkat angka capaiannya maka semakin banyak Rumah Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi yang ditingkatkan kualitasnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni

Pencapaian indikator Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 52,84% dari target 48,02%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 45,75%.

Sejak tahun 2022, pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana di provinsi Kalimantan Selatan adalah 136 unit rumah, tahun 2023 total pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana adalah 260 unit dan di Tahun 2024 total pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana adalah 740 unit. Selain itu juga adanya peningkatan anggaran penanganan dari Kab/ Kota di Provinsi Kalimantan

Selatan terhadap penanganan Rumah Tidak Layak Huni serta adanya kepedulian dari Perusahaan melalui dana CSR.

Peningkatan jumlah rumah layak huni terus meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 39,19% dari target 39,19%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2023 yaitu 34,97%.

Sejak Tahun 2022, luasan permukiman kumuh yang ditangani seluas 30 Ha atau sekitar 30,87%, pada tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang ditangani seluas 32,50 Ha, dan di Tahun 2024 luasan kawasan kumuh yang ditangani seluas 33,40 Ha. Peningkatan luasan kawasan kumuh yang telah tertangani ini tentu saja memberikan dampak pada keseluruhan penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Pada Tahun 2024, realisasi persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah sebesar 48,04 %, dibandingkan target sebesar 47,66%. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah sebesar 47,49%. Hal ini menunjukkan capaian indikator pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023.

Realisasi persentase meningkatnya kualitas dalam penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota adalah merupakan target dalam Renstra 2021-2026.

d. Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian indikator ini sama dengan capaian Tahun

2023 yaitu 100%. Indikator ini merupakan indikator terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan yang merupakan urusan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Jumlah RTLH korban bencana yang sudah dilaksanakan rehabilitasi sebanyak 4.337 unit dari total rumah korban bencana sebanyak 7.177 unit. Sisa rumah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 2.840 unit dan upaya yang lain mensosialisasikan/menyampaikan kepada calon penerima bantuan tentang proses pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi RTLH Korban Bencana.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni

Penambahan anggaran perbaikan RTLH melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 secara langsung berpengaruh terhadap jumlah rumah yang dapat diperbaiki. Dengan adanya dana yang lebih besar, pemerintah dapat memperluas cakupan program perbaikan RTLH, sehingga lebih banyak rumah yang bisa diperbaiki dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran dan jumlah rumah yang diperbaiki juga mencerminkan tingginya prioritas yang diberikan terhadap masalah perumahan, khususnya rumah yang tidak layak huni. Dengan adanya perhatian lebih terhadap sektor perumahan, maka lebih berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki.

Upaya yang telah dilakukan: 1. Peningkatan Alokasi Anggaran perbaikan RTLH, 2. Penyusunan Data dan Pemetaan RTLH yang Akurat, 3. Pendampingan dan Kerjasama antara Tim Bidang Perumahan dengan Fasilitator Lapangan dan stakeholder terkait, 4. Sosialisasi program dan pendampingan terhadap masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja: 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, 2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas (Akses yang Sulit ke Lokasi Perbaikan), 3. Koordinasi Antar Instansi belum optimal 4. Ada

perubahan data Penerima bantuan RTLH yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kalsel (meninggal).

Rencana Tindak Lanjut: 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia, 2. Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas (koordinasi dengan SKPD Teknis terkait lainnya), 3. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga, 4. Pengelolaan Data dan Pemetaan RTLH yang Akurat.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi melalui indikator kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani dari kurun waktu 2017 sampai 2023 yaitu capaian Tahun 2018 sebesar 12,26%, tahun 2019 tercapai 22,25%, tahun 2020 tercapai 23,17%, tahun 2021 tercapai 26,92%, tahun 2022 mencapai 30,93 % dan tahun 2023 ini mencapai 34,97 %. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan. Indikator ini telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luasan kawasan kumuh dengan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel Rekapitulasi Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2023

No.	KABUPATEN/KOTA	LUAS KAWASAN KUMUH	PENANGANAN KUMUH		SISA PENANGANAN KUMUH	RENCANA PENANGANAN KUMUH	RENCANA SISA PENANGANAN KUMUH
			2018 s/d 2021	2022 s/d 2023		2024 s/d 2026	
1	Kota Banjarmasin	60,45	13,10	11,50	35,85	13,66	22,19
2	Kota Banjarbaru	51,61	9,40	-	42,21	2,00	40,21
3	Kab. Banjar	92,67	24,52	16,00	52,15	14,00	38,15
4	Kab. Tapin	23,11	10,86	9,50	2,75	1,30	1,45
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	64,50	24,14	11,50	28,86	20,00	8,86
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	80,28	13,13	-	67,15	10,40	56,75
7	Kab. Hulu Sungai Utara	66,11	18,50	-	47,61	4,00	43,61
8	Kab. Balangan	14,85	13,11	-	1,74	-	1,74
9	Kab. Tabalong	148,89	21,15	4,00	123,54	16,00	107,54
10	Kab. Barito Kuala	60,77	20,93	2,00	37,84	6,00	31,84
11	Kab. Tanah Laut	33,93	16,61	3,00	14,32	7,09	7,23
12	Kab. Tanah Bumbu	94,16	15,71	2,00	76,45	5,30	71,15
13	Kab. Kotabaru	35,54	13,64	3,00	18,90	4,00	14,90
	JUMLAH	791,51	214,80	62,50	549,37	103,75	445,62

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

Proses verifikasi data Bidang Pengembangan Permukiman sesuai nomenklatur meliputi: a. jaringan jalan; b. saluran pembuangan air hujan atau drainase; dan c. pembangunan RTLH. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya Pemerataan pelaksanaan kegiatan penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten/Kota, dan upaya percepatan penurunan nilai kekumuhan di Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2024.

Hambatan dalam pencapaian indikator ini diantaranya:

- Belum memadainya perencanaan dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh masih secara parsial, karena keterbatasan dokumen identifikasi dan dokumen perencanaan.

Rencana tindak lanjut dalam penanganan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya :

- Upaya peningkatan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman.
- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Pengembangan Kawasan Permukiman
- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Kawasan Kumuh
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman

c. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan PSU permukiman, dan kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman, serta kegiatan koordinasi dalam rangka Penyediaan PSU Permukiman. Faktor keberhasilan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan adalah terjalinnya koordinasi antar instansi dalam rangka perencanaan dan penanganan PSU dan ketersediaan anggaran dalam rangka penuntasan dan percepatan penanganan PSU Permukiman di kab/Kota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman diantaranya Pemerataan pelaksanaan kegiatan penanganan jalan lingkungan permukiman di Kabupaten/Kota, dan upaya percepatan penuntasan pelaksanaan PSU Permukiman serta Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2024.

Hambatan dalam pencapaian indikator ini diantaranya:

- Belum memadainya perencanaan/ peningkatan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman,
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

Rencana tindak lanjut dalam pencapaian indikator ini ke depannya yaitu :

- Upaya peningkatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman.
- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

d. Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan berupa rehabilitasi rumah korban bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021. Untuk itu, sejak Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan dengan metode bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir pada beberapa Kabupaten yang terdampak. Data rumah yang menjadi korban bencana banjir pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah rumah korban bencana tahun 2021 sebanyak 7.177 unit rumah dimana yang sudah dilaksanakan pembangunan/ rehabilitasi sebanyak 5.078 unit (70,88%), melalui dana APBN (BNPB) maupun APBD Provinsi sejak Tahun 2022 s.d 2024. Adapun sisa rumah korban bencana yang belum ditangani sebanyak 2.090 unit yang akan dilakukan rehabilitasi pada tahun 2025 s.d 2026 (sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026).

Tabel Rekapitulasi Rumah Korban Bencana Tahun 2021

No	Lokasi		Kerusakan Infrastruktur (Jenis dan Jumlah)				Jumlah Total
	Kab/Kota	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Hilang	
	Balangan	Halong	24	-	-		
		Juai	239	-	-		
		Paringin	34	-	-		
		Tebing Tinggi	63	-	-		
		Paringin Selatan	43	-	-		
		Lampihong	122	-	-		
		Awayan	54	-	-		
	Jumlah		579	-	-		
	Banjar	Aranio	1	8	5	7	
		Astambul	44	23	8		
		Beruntung Baru	20	14	2		
		Gambut	-	-	1		
		Kertak Hanyar	150	47	22	4	
		Martapura Barat	17	1	3		
		Martapura Timur	60	14	-		
		Martapura	127	186	59		
		Martapura	159	33	4		
		Mataraman	1	2	6		
		Paramasan	-	9	8	7	
		Pengaron	6	4	8		
	Simpang Empat	5	5	7			
	SungaiTabuk	1	8	-	9		
	Jumlah		591	354	133	27	
	Tabalong	Murung Pudak	16	4	9		
	Jumlah		16	4	9		
	Tanah Laut	Pelaihari	-	26	6		
		Bati-Bati	-	8	10		
		Kurau	-	53	-		
		Takisung	8	130	6		
		Bumi Makmur	133	40	34		
		Penyipatan	35	19	-		
	Kintap	15	2	6			
	Jumlah		191	278	62		
	Hulu Sungai Tengah	Barabai	-	-	4		
		Batu Benawa	-	-	83		
		Hantakan	-	-	181		
	Jumlah		-	-	268		
	Batola	Mandastana	628	27	-		
		Jejangkit	742	-	-		
		Alalak	326	-	1		
Cerbon		16	-	-			
Jumlah		1.712	27	1			
Banjarmasin	Banjarmasin Timur	1.028	398	90			
	Banjarmasin Tengah	47	7	5			
	Banjarmasin Selatan	163	101	39			
Jumlah		1.238	506	134			
Banjarbaru	Banjarbaru Utara	268	-	-			
	Banjarbaru Selatan	98	2	-			
	Cempaka	216	59	13	1		
	Landasan Ulin	92	-	-			
	Liang Anggang	178	33	32			
Jumlah		852	94	45	1		
Hulu Sungai Selatan	Telaga Langsat	-	1	-			
	Simpur	-	-	-			
	Loksado	-	29	-			
	Padang Batung	-	1	-			
	Angkinang	-	1	-			
Jumlah		-	32	-			
Tapin	Binuang	-	23	-			
Jumlah		-	23	-			
Hulu Sungai Utara		-	-	-			
Jumlah		-	-	-			
TOTAL			5.179	1.318	652	28	7.177

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

Tabel Rekapitulasi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sd 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana	PEMBANGUNAN / REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA					Sisa rumah korban bencana yang belum ditangani	
			APBN / BNPB	APBD Provinsi					Jumlah
				2021	2022	2023	2024		
1	Kota Banjarmasin	1.878	-	-	-	10	10	1.868	
2	Kota Banjarbaru	992	-	-	-	-	-	992	
3	Kab. Banjar *)	1.105	1.054	30	125	300	1.509	- 404	
4	Kab. Tapin	23	-	-	-	5	5	18	
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	32	-	-	-	20	20	12	
6	Kab. Hulu Sungai Tengah *)	268	247	45	30	25	347	- 79	
7	Kab. Hulu Sungai Utara *)	-	-	-	-	20	20	- 20	
8	Kab. Balangan	579	517	11	5	25	558	21	
9	Kab. Tabalong	29	-	-	-	20	20	9	
10	Kab. Barito Kuala *)	1.740	1.606	25	75	215	1.921	- 181	
11	Kab. Tanah Laut *)	531	517	25	25	100	667	- 136	
12	Kab. Tanah Bumbu *)	-	-	-	-	10	10	- 10	
13	Kab. Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	7.177	3.941	136	260	750	5.087	2.090	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

Permasalahan dalam pencapaian target indikator ini diantaranya :

- Pemahaman terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat masih rendah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Belum adanya data yang upade dan akurat terkait dengan data kebencanaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Jenis bencana yang masuk dalam kategori bencana alam hampir tidak ada terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain.
- Jumlah personil yang ada di SKPD belum mencukupi untuk dapat melaksanakan kegiatan terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Luasan wilayah yang harus dilakukan kajian sangat luas sehingga agak menyulitkan dalam melakukan survey dan identifikasi.
- Masih kurangnya koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kegiatan yang berhubungan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Dukungan penganggaran yang dirasa masih kurang dalam penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat dibandingkan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018.

Rencana tindak lanjut dalam pencapaian indikator ini diantaranya :

- Meningkatkan pemahaman kepada personil terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat melalui sosialisasi, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- Melakukan pendataan yang akurat terkait kedua jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tersebut kepada SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menanganinya.
- Meningkatkan pendanaan dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat terkait kriteria-kriteria kegiatan yang harus dilakukan dalam penerapan SPM ini.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat, daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam rangka penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan Program yang dilaksanakan selama Tahun 2024, yaitu :

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2. Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rumah yang Layak	79,61	82,14	103,2
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	79,39	79,39	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	90,00	90,40	100,4
		Jumlah Inovasi Pelayanan	1,00	1,00	100

		Publik yang Diterapkan			
Rata – Rata Capaian					100,9

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Rumah yang Layak:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah rumah layak}}{\text{Jumlah rumah di Prov. Kalsel}} \times 100 \quad (5)$$

Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik:

$$(\%) = \frac{\text{Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik}}{\text{Luas permukiman di Prov. Kalsel}} \times 100 \quad (6)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Rumah yang Layak	37,43	75,43	76,69	78,21	79,61	82,14	103,2
2.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	72,39	76,34	77,09	78,37	79,39	79,39	100
3.	Nilai IKM		-	80,02	85,79	90,00	90,40	100,4
4.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan		-	1	1	1,00	1,00	100
Rata – Rata Capaian								100,9

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Persentase Rumah yang Layak	82,14							
2.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	79,39							
3.	Nilai IKM	90,40							
4.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan	1,00							

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator **Persentase Rumah yang Layak** tahun 2024 terealisasi sebesar 82,14% dari target 79,61% sehingga persentase capaian indikator Persentase Rumah yang Layak pada tahun 2024 sebesar 103,17%. Indikator ini merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah rumah layak}}{\text{Jumlah rumah di Prov. Kalsel}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{944.579}{1.150.028} \times 100 = 82,14\%$$

Pencapaian indikator **Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik** tahun 2024 terealisasi sebesar 79,39% dari target 79,39% sehingga persentase capaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik pada tahun 2024 sebesar 100%. Indikator ini

merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{\text{Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik}}{\text{Luas permukiman di Prov. Kalsel}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{62.388,23}{78.588} \times 100 = 79,39\%$$

Indikator **Nilai IKM** tahun 2024 memperoleh nilai 90,40 dari target nilai 90 sehingga persentase capaian indikator Nilai IKM pada tahun 2024 adalah 100,44%. Indikator ini merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya.

Indikator **Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan** tahun 2024 tercapai 1 inovasi dari target 1 inovasi yang diterapkan sehingga persentase capaian indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada tahun 2024 adalah 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Rumah yang Layak

Capaian indikator Persentase rumah yang layak di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Tahun 2024 mencapai 82,14%, meningkat dibanding capaian Tahun 2023 sebesar 76,69%. Diharapkan di Tahun depan, persentase rumah yang layak di Kalsel semakin meningkat diiringi dengan program kegiatan penunjang yang lebih banyak baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun swasta melalui CSR.

Realisasi peningkatan jumlah rumah layak huni di provinsi Kalimantan Selatan meningkat disebabkan peningkatan jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang, peningkatan RTLH menjadi RLH serta rumah yang telah dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi. Peningkatan jumlah rumah layak huni juga meningkat karena adanya kerjasama dengan swasta (CSR) maupun melalui organisasi masyarakat.

Peningkatan jumlah rumah layak huni meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 944.579 unit. Peningkatan jumlah rumah layak huni dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain meningkatnya jumlah

pembangunan rumah baru, baik oleh pihak swasta atau swadaya masyarakat maupun bantuan dari organisasi masyarakat dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan melalui dana pusat, APBD I, APBD II ataupun CSR. Peningkatan jumlah rumah layak huni terus meningkat dari beberapa tahun sebelumnya tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik

Indikator persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas Kawasan kumuh dan peningkatan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman. Hingga tahun 2024, persentase luasan kawasan permukiman dalam kondisi baik tercapai 79,39, meningkat dibandingkan capaian indikator ini di Tahun 2023 yang mencapai 78,37%.

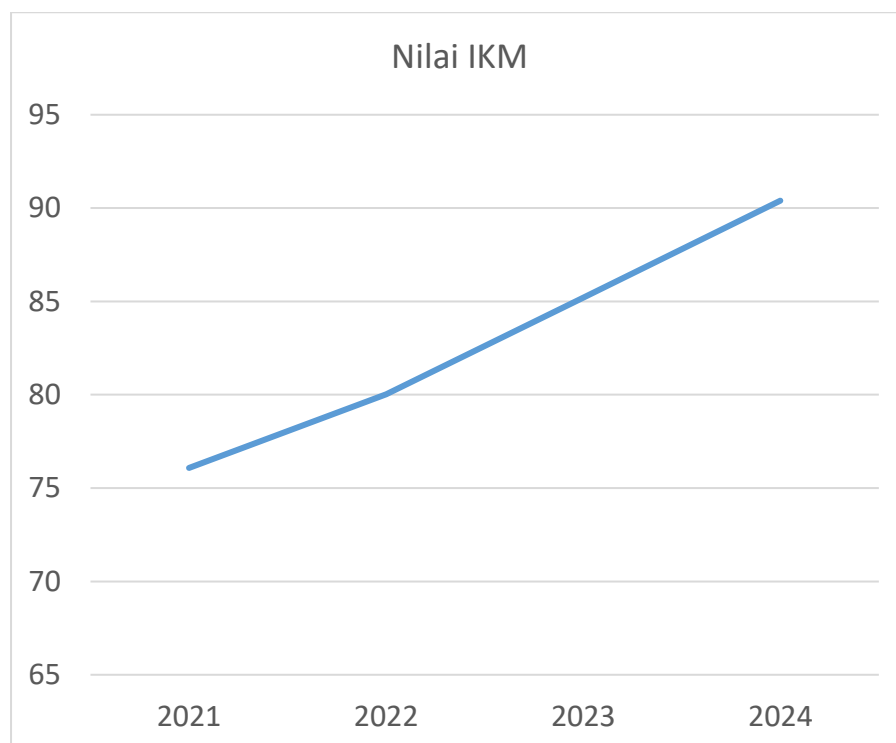
Realisasi indikator Persentase berkurangnya luasan Kawasan Permukiman Kumuh oleh eselon III Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator eselon II ini. Hingga Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mampu meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 39,19%. Realisasi terkait lainnya yaitu capaian indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

c. Nilai IKM

Realisasi dan capaian Nilai IKM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 adalah 90,4 dengan Target 90,00, persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100,44% ; Nilai IKM Tahun 2023 sebesar 85,79 dengan target 85,00.

Indikator Nilai IKM mulai ada pada IKU eselon II sejak Tahun 2022, capaian indikator ini meningkat setiap tahunnya sehingga diharapkan dapat mencerminkan keseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait pelaksanaan

program kerjanya. Kurva peningkatan nilai IKM SKPD dapat dilihat pada kurva berikut.



d. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan

Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan merupakan indikator wajib bagi seluruh Eselon II Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun 2022. Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan satu (1) inovasi berbasis teknologi informasi yaitu aplikasi SI-IMAH atau Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni dan kemudian diterapkan di Tahun 2023.

Pada tahun ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan 1 Inovasi dalam Sistem Aplikasi data RTLH di 13 Kab/ Kota Melalui Sistem Aplikasi SI_IMAH dimana dalam aplikasi data yang disampaikan sudah BNBA dan sesuai dengan kewenangan sehingga bantuan tepat sasaran tidak ada tumpang tindih untuk perbaikan RTLH di Kab/ Kota baik yang dikerjakan oleh SKPD sendiri maupun Dinas Lainnya.

Adanya peningkatan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir karena data yang dibuat dan dikolabari melalui SI_IMAH sudah dapat dipertanggung jawabkan karena per *By name by address*.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Rumah yang Layak

Keberhasilan dalam peningkatan Rumah Layak tidak terlepas dari kinerja dan program yang dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan standar minimal dimana adanya sinergitas dan kolaborasi pendanaan penanganan yang dilaksanakan baik dengan pusat, SKPD dinas terkait di Provinsi, Kab/ Kota dan CSR Perusahaan dan BAZNAS yang bersama-sama melalui data yang ada secara bersama di Kalimantan Selatan sehingga presentasi rumah layak meningkat.

Upaya dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi penanganan melalui sistem SI_IMAH yang datanya sudah BNBA sehingga pendanaan ke masyarakat tepat sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing yang menangani serta pemerataan kegiatan sesuai dengan prioritas penanganan dengan anggaran tersedia.

Adapun Hambatan dalam pencapaian kinerja adalah adanya perbedaan data terkait penanganan dan pembagian kewenangan yang dilaksanakan oleh dinas Perkim dan SKPD lainnya. Rencana tindak lanjut dengan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi penanganan agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing dan penyamaan satu data melalui aplikasi SI_IMAH sehingga data akurat dan tepat sasaran dalam pelaksanaan bantuan.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik

Keberhasilan dalam penanganan kawasan permukiman tidak terlepas dari kinerja/program lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan standar minimal dalam kawasan permukiman, khususnya kawasan permukiman kumuh. Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh lebih dititik beratkan pada penyediaan jaringan jalan lingkungan dan drainase pada kawasan permukiman.

Upaya yang dilakukan diantaranya Pemerataan pelaksanaan kegiatan penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten/Kota, dan upaya percepatan penurunan nilai kekumuhan di Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2023.

Hambatan dalam penanganan :

- Belum memadainya perencanaan dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh, terutama untuk pemenuhan 7 indikator kawasan kumuh
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh masih secara parsial, karena keterbatasan dokumen identifikasi dan dokumen perencanaan.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk memaksimalkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Upaya peningkatan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman.
- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Pengembangan Kawasan Permukiman
- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Kawasan Kumuh
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman.

c. Nilai IKM

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka

diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Jenis layanan publik yang disurvei kepuasan masyarakatnya adalah program Bansos Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH) kabupaten Batola, Kab. Banjar dan Kab. Tanah Laut dari populasi 260 Orang diambil sampel 155 orang, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru dengan jumlah populasi 720 Orang diambil sampel 367 orang dan Penanganan PSU permukiman yang berlokasi di Desa Kait-Kait Kabupaten Tanah laut dari populasi 440 orang, diambil sampel 205 orang yang diberikan kuesioner berupa pertanyaan seputar kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. Data survei kemudian dikumpulkan dan dikompilasi hingga diperoleh nilai IKM 85,79.

Hasil survey kepuasan masyarakat ini sebagai bahan evaluasi untuk di masa yang akan datang dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga pelayanan prima dapat terwujud. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan masyarakat dapat terpenuhi.

d. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan

Pada tahun ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan 1 Inovasi pelayanan dalam Sistem Aplikasi data RTLH di 13 Kab/ Kota Melalui Sistem Aplikasi SI_IMAH dimana dalam aplikasi data yang disampaikan sudah BNBA dan sesuai dengan kewenangan sehingga bantuan tepat sasaran tidak ada tumpang tindih untuk perbaikan RTLH di Kab/ Kota baik yang dikerjakan oleh Dinas Perkim sendiri maupun Dinas Lainnya.

Upaya dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi penanganan melalui sistem SI_IMAH yang datanya sudah BNBA sehingga pendanaan ke masyarakat tepat sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing yang menangani serta pemerataan kegiatan sesuai dengan prioritas penanganan dengan anggaran tersedia.

Hambatan dalam pencapaian kinerja adalah adanya perbedaan data terkait penanganan dan pembagian kewenangan yang dilaksanakan oleh dinas Perkim dan SKPD lainnya. Rencana tindak lanjut dengan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi penanganan agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing dan penyamaan satu data melalui aplikasi SI_IMAH sehingga data akurat dan tepat sasaran dalam pelaksanaan bantuan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon II (Kepala Dinas) Tahun 2024 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- c. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

3. Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,70	83,46	99,71
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas	93,00	93,00	100
3.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas	100,00	100,00	100

4.	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran Dinas	93,00	62,43	67,13
		Persentase aset yang terpelihara	100.00	100,00	100
Rata – Rata Capaian					91,71

Sumber : Sekretariat

Rumus perhitungan:

Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan}} \times 100 \quad (7)$$

Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah pegawai yang dilayani}}{\text{Jumlah pegawai Dinas}} \times 100 \quad (8)$$

Persentase penyerapan anggaran Dinas:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Pagu anggaran Dinas}} \times 100 \quad (9)$$

Persentase Aset yang terpelihara:

$$(\%) = \frac{\text{Aset yang terpelihara}}{\text{Seluruh aset yang dimiliki Dinas}} \times 100 \quad (10)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80,09	81,55	82,40	83,46	83,70	83,46	99,71

2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100	85	85	90	93,00	93,00	100
3	Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SKPD	100	100	100	100	100,00	100,00	100
4	Persentase penyerapan anggaran SKPD	98,23	94,53	96,52	93,81	93,00	62,43	67,13
5	Persentase aset yang terpelihara	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100
Rata – Rata Capaian								91,71

Sumber : Sekretariat

1) Perbandingan Realisasi dengan target

a. Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 belum ada capaiannya mengingat SAKIP 2024 dievaluasi di tahun 2025. Adapun nilai 83,46 yang diisikan merupakan nilai SAKIP Dinas Tahun 2023 yang ditetapkan di bulan September 2024. Persentase capaian kinerja meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,71%. Ini menggambarkan terjadi peningkatan capaian kinerja daripada tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 1.58%.

b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas tahun 2023 terealisasi sebesar 93% dari target 93%,

sehingga persentase capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD tahun 2024 sebesar 100%.

c. Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SKPD

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas tahun 2024 sebesar 100%.

d. Persentase penyerapan anggaran SKPD

Pencapaian indikator Persentase penyerapan anggaran SKPD tahun 2024 terealisasi sebesar 62,43% dari target 93%, sehingga indikator persentase capaian penyerapan anggaran SKPD tahun 2024 terealisasi sebesar 67,13%.

e. Persentase aset yang terpelihara

Pencapaian indikator Persentase aset yang terpelihara tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian aset yang terpelihara tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00%.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar 83,46, sedangkan nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 82,40 dan capaian kinerja akuntabilitas kinerja tahun 2023 adalah 97,43 %. Hal ini menunjukkan kenaikan nilai sakip dari Tahun 2022 sd 2023 sebesar 0,7 poin.

Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 s.d Tahun 2023 yaitu Tahun 2018 sebesar 70,64 (BB), Tahun 2019 sebesar 76,83 (BB), Tahun sebesar 2020 sebesar 80,09 (A), Tahun 2021 sebesar 81,55 (A), Tahun 2022 sebesar 82,40 (A) dan Tahun 2023 sebesar 83,46. Ini menunjukkan nilai akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat.

Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar 83,46, capaian kinerja sampai dengan tahun ini adalah 99,71% terhadap target Nilai SAKIP pada Rencana Strategis Dinas sebesar 83,70.

b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas

Target Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 93% untuk Capaian Kinerja Tahun 2024 ini adalah sebesar 100%. Adapun persentase capaian kinerja pemenuhan sarana dan prasarana dari tahun 2019 s.d 2024 tercapai 100% dari target per tahunnya.

c. Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas

Realisasi dan capaian kinerja persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas pada Tahun 2024 adalah 100% sehingga persentase capaian kinerja persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas Tahun 2024 adalah 100%. Persentase capaian kinerja persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas dari Tahun 2019 s.d 2022 adalah sebesar 100 % dari target per tahunnya.

Realisasi kinerja pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas tahun 2024 adalah 100 %. Ini menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 100% dan target pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk indikator kinerja persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas adalah 100%.

d. Persentase penyerapan anggaran SKPD

Realisasi capaian kinerja persentase penyerapan anggaran Dinas adalah 62,43% dari target 93% sehingga persentase capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Tahun 2024 ini adalah 67,13%; Realisasi persentase penyerapan anggaran Dinas Tahun 2023 adalah sebesar 93,81% dari Target 93% sehingga persentase capaian kinerja tersebut Tahun 2022 adalah 100%. Adapun persentase penyerapan anggaran Dinas dari Tahun 2019 s.d 2023 persentase capaian kinerjanya adalah 100% untuk setiap

tahunnya. Namun di Tahun 2024, persentase capaian kinerja indikator ini tidak bisa mencapai target yang diinginkan.

e. Persentase aset yang terpelihara

Realisasi capaian kinerja persentase aset yang terpelihara Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah 100%. Realisasi dan capaian kinerja persentase aset yang terpelihara pada Tahun 2024 adalah 100%; Persentase capaian kinerja persentase aset yang terpeliharaan dari Tahun 2019 s.d 2024 adalah sebesar 100 % dari target per tahunnya.

Realisasi kinerja persentase aset yang terpeliharaan tahun 2024 adalah 100%; ini menunjukkan capaian kinerja nya sebesar 100% dan target pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk indikator kinerja persentase persentase aset yang terpelihara adalah 100%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nilai Sakip dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 terjadi peningkatan dari nilai 82,40 menjadi 83,46 dari Target 83,70 ; persentase capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2023 adalah 98,45 % sedangkan tahun 2024 adalah 99,17 %; peningkatan nilai sakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan adalah menunjukkan keberhasilan dari implementasi sakip berbasis kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pada indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Selain ini juga ada yang mendukung yaitu sub kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Nilai Sakip dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 terjadi peningkatan dari nilai 82,40 menjadi 83,46 dari Target 83,70 ; persentase capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2023 adalah 98,45 % sedangkan tahun 2024 adalah 99,17 %; Upaya-upaya yang telah dilakukan dari peningkatan nilai sakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan adalah perencanaan & penganggaran diusahakan selaras dan terukur pencapaian kinerjanya, pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan per semester setiap tahunnya. Dengan adanya evaluasi berkala yang dilakukan, maka Dinas dapat mengukur capaian kinerja sehingga terwujud kesesuaian, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap target program dan kegiatan prioritas. Dengan meningkatnya nilai Sakip dari Tahun 2023 dan 2024 ini menunjukkan keberhasilan dari implementasi sakip berbasis kinerja.

Hambatan dalam pencapaian indikator SAKIP ini adalah pelaksanaan program prioritas belum memiliki mekanisme crosscutting lintas perangkat daerah/antar perangkat daerah dan stake holder terkait; Belum optimalnya dalam perencanaan dan evaluasi kinerja karena adanya aturan-aturan yang baru dari kementerian RB tentang poses penjenjangan kinerja; serta penyusunan cascading berdasarkan dari penyusunan critical success faktor (CSF) yang merupakan kondisi/hasil yang ingin dicapai pada dinas ini.

Upaya dalam menghadapi hambatan penerapan SAKIP adalah mengidentifikasi dan memetakan crosscutting dan koordinasi antar perangkat daerah dalam mengawal prioritas pembangunan daerah dengan menciptakan sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah. Untuk itu, Dinas menyusun rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan capaian indikator ini yaitu Dinas akan lebih intensif melakukan konsultasi kepada tim evaluator dan meminta masukan/saran untuk penyelesaian perbaikan LAKIP SKPD yang sudah dievaluasi serta melakukan evaluasi penilaian mandiri budaya kerja per

semester atau 2 kali dalam setahun. Dan juga ASN dapat mengikuti bimtek penguatan SDM tentang perencanaan dan evaluasi kinerja terhadap aturan-aturan terbaru dari Pemerintah Pusat (Kepmenpan RB)

b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas

Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas adalah dimulai dari penyusunan dan pengusulan RKBU untuk setiap tahunnya baik itu APBD Murni maupun APBD Perubahan. Pada saat penyusunan Renja Dinas untuk pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan RKBU yang diusulkan. Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas tidak lepas dari upaya secara berkala mengusulkan RKBMD dan RKBMD Perubahan untuk Sarana, Prasarana SKPD sehingga indikator ini bisa berhasil tercapai 100%.

Hambatan dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas adalah terbatasnya/kecilnya anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana SKPD, sehingga pemenuhan Sarpras perangkat daerah dipenuhi secara bertahap sesuai dengan target Renstra dinas.

Tindak Lanjut mengatasi hambatan pada pemenuhan sarana dan prasarana dinas adalah menyusun RKBU sesuai sarana dan prasarana butuhan dinas dan percepatan pemenuhan sarpras dinas dapat dilakukan pada dana APBD-P yaitu dengan menggeser/menggunakan dana sisa tender/kontrak yang sebagian dialokasikan untuk pemenuhan sarpras yang dibutuhkan Dinas.

c. Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas

Proses pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dinas adalah membuat format/blanko administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku serta melayani seluruh ASN Dinas sesuai dengan prosedur. Upaya pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dinas

adalah membuat format/blanko administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku serta melayani seluruh ASN Dinas sesuai dengan prosedur.

Hambatan dalam pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dinas adalah Minimnya jumlah pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian dinas serta kurangnya tenaga IT, karena dalam digitalisasi atau pemenuhan administrasi kepegawaian secara aplikasi; serta kurangnya PNS yang memiliki bidang keuangan, teknis urusan perumahan dan permukiman dan juga fungsional arsiparis dalam upaya peningkatan pengelolaan arsip pada dinas.

Rencana tindak lanjut menghadapi hambatan pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas adalah menyampaikan usulan permohonan tambahan PNS kepada Badan Kepegawaian Daerah dan mengoptimalkan tenaga IT yang ada pada Dinas, dengan memegang beberapa aplikasi pemenuhan urusan administrasi kepegawaian serta aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

d. Persentase penyerapan anggaran SKPD

Persentase penyerapan anggaran tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan kurang dari target yang direncanakan, ini disebabkan adanya Pagu APBD Perubahan yang tidak dapat direalisasikan karena terlambatnya DPA Perubahan disahkan, sehingga waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan; Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

upaya yang telah dilakukan diantaranya melaksanakan evaluasi SPJ fungsional setiap bulannya, mengadakan rapat koordinasi, monitoring & evaluasi terkait realisasi fisik dan keuangan, sehingga apabila terdapat kendala/hambatan dapat merencanakan tindak lanjut untuk diatasi segera serta memberikan justifikasi teknis / alasan pada realisasi kinerja yang tidak tercapai 100%.

Adapun hambatan dalam pencapaian target ini yaitu terdapat ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan realisasi keuangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan realisasi keuangan atau tertundanya realisasi keuangan. Rencana tindak lanjut dalam mengatasi hambatan adalah lebih optimal dalam penyusunan RAK dan benar-benar direncanakan sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Segera menyampaikan usulan pergeseran RAK apabila ada pergeseran pelaksanaan sehingga dapat merealisasikan keuangan yang tidak sesuai dengan rencana awal RAK yang telah disusun; PPTK lebih mencermati RAK yang telah disusun dan menjadikan acuan dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan t\pada tahun 2024.

e. Persentase aset yang terpelihara

Persentase aset yang terpelihara di Tahun 2024 mencapai 100 %. Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Upaya yang telah dilakukan yaitu dana operasi dan pemeliharaan benar-benar dioptimalkan untuk pemeliharaan aset yang masih berfungsi dengan tujuan supaya pemakaian dapat digunakan dalam jangka panjang; mengidentifikasi aset yang masih berfungsi untuk mendapatkan pemeliharaan sehingga barang tsb dapat berfungsi lebih lama

Hambatan dalam pemeliharaan aset adalah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selalu digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, sehingga untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional tersebut harus benar-benar di jadwalkan untuk pemeliharaannya, baik itu service dan penggantian spare part.

Tindak Lanjut dalam menghadapi hambatan pemeliharaan aset Dinas adalah untuk pemeliharaan baik itu service dan penggantian spare part dilaksanakan pada hari libur, sehingga tidak mengganggu operasional kendaraan dinas pada hari kerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Sekretaris) Tahun 2024 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Eselon IV (Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	18	18	100
2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	5	5	100
		Jumlah aset yang tercatat	110	278	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Sekretariat

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah dokumen	16	16	16	18	18	18	100

	kinerja sesuai ketentuan							
2.	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	5	5	5	5	5	5	100
3.	Jumlah aset yang tercatat	35	17	39	35	110	278	100
	Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Sekretariat

(a) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan tahun 2024 terealisasi sebanyak 18 dokumen dari target 18 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan tahun 2024 sebesar 100%. Dokumen-dokumen kinerja tersebut diantaranya RENJA 2024, RENJA Perubahan 2023, LPPD/LKPJ, LAKIP, Dokumen Capaian Kinerja Bulanan dan Dokumen IKU.

Pencapaian indikator Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tahun 2024 terealisasi sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tahun 2023 sebesar 100%. Laporan tersebut berupa laporan keuangan per triwulan (4 dokumen) dan laporan akhir (1 dokumen).

Pencapaian indikator Jumlah aset yang tercatat tahun 2024 terealisasi sebanyak 11 paket dari target anggaran murni 6 paket dan di anggaran perubahan tambahan 5 paket dengan total 11 paket, sehingga persentase capaian Jumlah aset yang tercatat tahun 2024 sebesar 100%. Jenis aset yang tercatat selama tahun 2024 antara lain, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 55 unit, Meubeler 110 unit, dan Alat Rumah Tangga Lainnya Gorden 113 set.

(b) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

(i) Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan

Pada tahun 2024, capaian indikator Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan mencapai 100%. Capaian ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2023. Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (18 Dokumen) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (100%) maka telah terpenuhi dari target tersebut yakni sebesar 100%

(ii) Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Pada tahun 2024, indikator Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tercapai 100%. Capaian ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya (2020-2023) realisasi tahun 2024 masih tetap sama yakni 5 dokumen. Demikian juga realisasi kinerja tahun 2024 ini ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi maka tetap sama tercapai 100%.

(iii) Jumlah aset yang tercatat

Pada tahun 2024, Jumlah aset yang tercatat sebesar 278 unit. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Jumlah aset yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 35 unit. Namun, secara presentase, capaian indikator ini di Tahun 2023 maupun 2024 sama sama terealisasi 100%.

Jika diandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir maka terdapat fluktuasi capaian yakni tahun 2019 (39 unit), tahun 2020 (35 unit), tahun 2021 hanya (17 unit) dan tahun 2022 (39 unit) sedangkan tahun 2023 (35 unit), pencapaian ini tidak lepas dari kebutuhan aset untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan. Demikian jika dibandingkan realisasi kinerja tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi maka juga telah tercapai 100%.

(c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(i) Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan

Pada tahun 2024, penyebab pendukung keberhasilan kinerja yang telah dilakukan yakni semua rencana yang telah disusun telah di koordinasikan dengan bidang-bidang dan seksi terkait sehingga penyusunan laporan kinerja dapat selesai tepat waktu demikian juga untuk dokumen laporan lainnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja yakni dengan melaksanakan komunikasi yang intens serta koordinasi dengan bidang dan seksi terkait melalui berbagai forum rapat/pertemuan internal sehingga berbagai masalah yang muncul selama proses kegiatan dapat diantisipasi dan diselesaikan secara baik.

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan yakni sulitnya mencari waktu untuk koordinasi tatap muka dengan para bidang dan seksi teknis karena lebih banyak kegiatan dilapangan dan hambatan lainnya yaitu pengumpulan data-data perencanaan dan data capaian kinerja yang disampaikan ke sub bagian perencanaan, keuangan dan aset waktunya terlalu mepet, sehingga terjadi keterlambatan pada pengumpulan laporan dan menjadi lemahnya dari sisi analisis data. Gangguan server/ jaringan pada E-Monev, E-Sakip,dll pada saat penginputan data.

Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan yakni dengan memperkuat dari sisi koordinasi dan sinkronisasi data kepada bidang dan seksi teknis terkait sehingga capaian kinerja berupa dokumen-dokumen yang akan di susun dapat tepat waktu serta lebih berkualitas. Berkoordinasi dengan Diskominfo, Bappeda, BPKAD terkait kendala jaringan internet maupun server aplikasi yang error.

(ii) Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Keberhasilan dalam upaya peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu tidak lepas dari adanya perubahan sistem pelaporan dari manual menjadi sistem pelaporan keuangan secara terpadu dengan berbasis IT namun keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk mengadopsi berbagai inovasi perlu terus untuk di tambah, sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung pada indikator ini adalah peningkatan SDM petugas baik melalui pelatihan dan bimtek berbasis IT maupun juga dukungan pada perangkat kerasnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja di atas adalah dengan mengikuti berbagai pertemuan koordinasi dan bimtek dari instansi pembina keuangan sehingga SDM yang ada dapat memenuhi kualifikasi.

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah lemahnya pada ketaatan jadwal pelaporan realisasi fisik dan keuangan dari bidang teknis terkait. Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan yakni perlunya koordinasi dan komitmen bersama untuk mentaati jadwal/skedschedule pelaporan serta laporan yang lebih berkualitas serta peningkatan SDM baik melalui pelatihan dan bimtek berbasis IT.

(iii) Jumlah aset yang tercatat

Keberhasilan atau pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu telah tercatatnya secara tertib 278 unit aset baru (143 unit melalui anggaran murni dan 135 unit pada anggaran perubahan) hasil belanja modal pada anggaran pada TA 2024. Program serta Kegiatan-Kegiatan yang paling mendukung pada indikator di atas yaitu adanya berbagai pertemuan, asistensi maupun bimtek oleh instansi pembina yang telah di ikuti sehingga berbagai masalah aset di SKPD dapat diselesaikan dengan baik.

Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja ini antara lain dengan mengikuti berbagai pertemuan koordinasi serta bimtek dari instansi pembina aset sehingga aset yang ada tercatat dengan tertib.

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja ini hanya pada perubahan aplikasi sistem pencatatan aset sehingga petugas aset perlu menyesuaikan kembali.

Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan yakni dengan selalu berkoordinasi dan konsultasi kepada instansi pembina terkait aset sehingga segala kemungkinan masalah yang muncul dapat diantisipasi.

(d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset) Tahun 2024 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Eselon IV (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	4	4	100
2.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	66	68	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Sekretariat

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	4	4	4	4	4	4	100
2.	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	35	63	64	66	66	68	100
Rata – Rata Capaian								100

Sumber : Sekretariat

(a) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun 2024 terealisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2024 terealisasi sebanyak 68 dari target 66 pegawai sehingga persentase capaian Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2024 sebesar 100%.

(b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

(i) Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat Tahun 2024 Sebanyak 4 Dokumen dari target dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan capaian yang sama sejak Tahun 2021 yang juga Terealisasi 100%.

(ii) Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib.

Realisasi Capaian indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya Dilayani Secara Tertib untuk Tahun 2024 dengan capaian 100% dari target 66 Orang yang tercapai 68 Orang, Terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan capaian 66 Orang.

Tahun 2024 Pegawai yang Administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib mencapai 68 Orang. Nilai ini lebih banyak dibandingkan dengan capaian indikator jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib Tahun 2021 sejumlah 63 Orang dan Tahun 2022 64 Orang Pegawai. Namun secara Persentase capaian inidikator tahun ini sama dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu 100%.

(c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(i) Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Pada tahun 2024, capaian indikator dokumentasi pelayanan surat menyurat tercapai 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian aktif melengkapi fasilitas pelayanan surat menyurat seperti buku catatan surat masuk/ surat keluar, dokumentasi cuti pegawai, dokumentasi kenaikan pangkat dan dokumentasi kenaikan gaji berkala.

Di Tahun 2024, Adanya perubahan ketentuan kode klasifikasi arsip dan mulai diterapkannya surat-menyurat secara elektronik. Upaya yang dilakukan adalah Mengikutsertakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis bagi pengelola surat-menyurat dan mulai menerapkan surat-menyurat secara elektronik.

Hambatan dalam pencapaian kinerja ini yaitu Belum ada tenaga khusus yang mengelola surat-menyurat dan tempat penyimpanan berkas surat-menyurat masih terbatas. Ke depannya, SKPD akan Mengikutsertakan Pengelola surat-menyurat pada bimbingan teknis surat secara elektronik dan menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan surat menyurat serta mengisi tenaga arsiparis.

(ii) Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib

Administrasi kepegawaian di tahun 2024 sudah terlayani dengan tertib. Pengelompokan pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan unit kerjanya dapat dilihat pada Tabel III.4. Adapun pengelompokan PNS berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas aktif menginfokan dan mengingatkan seluruh pegawai untuk melengkapi data-data pegawai dan menerapkan nilai-nilai ber-Akhlak dalam

sehari-hari. Selain itu, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan aktif menerapkan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkup SKPD dengan memasang maklumat pelayanan dan banner zona integritas untuk memastikan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel III.4 Pengelompokkan Pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan unit kerja

No	Kriteria	ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	45
2.	Perempuan	26
Berdasarkan Jenis Kepegawaian		
1.	PNS	26
2.	PPPK	2
3.	Tenaga Kontrak	43
Berdasarkan Pendidikan		
1.	Strata 2	10
2.	Srata 1	40
3.	Diploma III	6
4.	SMA	15

Sistem *reward and punishment* juga diterapkan dengan mengacu kepada kedisiplinan pegawai. Pemberian *reward* diberikan kepada ASN yang dinilai memiliki disiplin dan kinerja yang baik yang bisa dijadikan teladan untuk ASN lainnya. Sedangkan *punishment* berupa surat teguran bagi ASN yang tidak disiplin kehadirannya.

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Kedinasan, jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terbilang jauh dari cukup. Untuk itu, Dinas aktif mengajukan

permohonan penambahan ASN baru melalui jalur tes CPNS atau PPPK dengan usulan sesuai analisis kebutuhan pegawai Dinas kepada Badan Kepegawaian Daerah.

(d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Eselon IV (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian) Tahun 2024 didukung melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Eselon III (Kepala Bidang Perumahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	48,02	52,84	110,03
Rata – Rata Capaian					110,03

Sumber : Bidang Perumahan

Rumus perhitungan:

Presentase peningkatan rumah layak huni:

$$(\%) = \frac{RTLH \text{ yang ditingkatkan kualitasnya}}{\text{Jumlah total RTLH}} \times 100 \quad (11)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	-	42,23	43,35	45,75	48,02	52,84	110,03
Rata – Rata Capaian								110,03

Sumber : Bidang Perumahan

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 52,84% dari target 48,02% sehingga persentase capaian indikator kinerja ini di tahun 2024 sebesar 110,03%. Rincian perhitungan capaian indikator ini yaitu sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{RTLH \text{ yang ditingkatkan kualitasnya}}{\text{Jumlah total RTLH}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{23.207}{43.921} \times 100 = 52,84\%$$

Untuk Rehabilitasi RTLH Korban Bencana sesuai dengan kewenangan UU 23 Tahun 2014 terkait RTLH korban Bencana yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sudah dilaksanakan dengan target sebanyak 750 unit rumah, dan terealisasi sebanyak 740 unit. namun sesuai indikator RTLH pelaksanaan perbaikan dibantu oleh Kab/Kota penanganannya sehingga target RTLH sendiri mengalami kenaikan.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni

Pada tahun 2024, Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 52,84% dari target 48,02%. Pencapaian indikator ini meningkat dibandingkan capaian indikator yang sama di tahun 2023 yang hanya mencapai 45,75%.

Pada tahun 2022, pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana adalah 136 unit rumah di provinsi Kalimantan Selatan sedangkan pada tahun 2023 total pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana adalah 260 unit. Adapun di Tahun 2024, total pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi korban bencana adalah 740 unit. tahun 2024 ini ada peningkatan capaian kinerja karena adanya penambahan anggaran dalam perbaikan RTLH baik yang dilaksanakan oleh Provinsi sendiri maupun Kab/ Kota serta adanya dukungan CSR seperti BAZNAS, LAZISMU dan Perusahaan di Kalimantan Selatan.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi, maka perlu adanya komitmen dalam perbaikan RTLH dan kolaborasi penanganan untuk mencapai target yang diharapkan. Terkait realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional sudah sesuai dengan target nasional untuk provinsi Kalimantan Selatan rendah dari target Nasional sebesar 61, 65 %.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni

Penambahan anggaran perbaikan RTLH melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 secara langsung berpengaruh terhadap jumlah rumah yang dapat diperbaiki. Dengan adanya dana yang lebih besar, pemerintah dapat memperluas cakupan program perbaikan RTLH, sehingga lebih banyak rumah yang bisa diperbaiki dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran dan jumlah rumah yang diperbaiki juga mencerminkan tingginya prioritas yang diberikan terhadap masalah perumahan, khususnya rumah yang tidak layak huni. Dengan adanya perhatian lebih terhadap sektor perumahan, maka lebih berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki.

Upaya yang telah dilakukan: 1. Peningkatan Alokasi Anggaran perbaikan RTLH, 2. Penyusunan Data dan Pemetaan RTLH yang Akurat, 3. Pendampingan dan Kerjasama antara Tim Bidang Perumahan dengan Fasilitator Lapangan dan stakeholder terkait, 4. Sosialisasi program dan pendampingan terhadap masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja: 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, 2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas (Akses yang Sulit ke Lokasi Perbaikan), 3. Koordinasi Antar Instansi belum optimal 4. Ada perubahan data Penerima bantuan RTLH yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kalsel (meninggal).

Rencana Tindak Lanjut: 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia, 2. Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas (koordinasi dengan SKPD Teknis terkait lainnya), 3. Peningkatan Koordinasi

Antar Instansi dan Lembaga, 4. Pengelolaan Data dan Pemetaan RTLH yang Akurat.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Perumahan) Tahun 2024 didukung melalui Program/ Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menganalisa Dokumen Perencanaan/Kajian Urusan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	15	15	100
2.	Melakukan Pendataan RTLH secara Berkala	Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan	1	1	100
3.	Fasilitasi Sosialisasi Akses dalam Pemenuhan Rumah	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	10,76	10,93	
	Melaksanakan Sosialisasi Prosedur Urusan RTLH	Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH	50	50	100
Rata – Rata Capaian					

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Perumahan, Bidang Perumahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	-	2	3	2	15	13	86,67
2.	Jumlah Dokumen Data	-	-	-	-	1	1	100

	RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan							
3.	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan		12,78	12,10	10,93	10,76	10,93	
4.	Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH	-	-	-	-	50	50	100
Rata – Rata Capaian								

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Perumahan, Bidang Perumahan

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti

Pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti Tahun 2024 terealisasi sebanyak 13 dokumen dari target 15 dokumen, sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 86,67%. Hal ini terjadi karena 2 dokumen tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2024.

Dokumen Perencanaan yang telah disediakan pada tahun 2024 sesuai target adalah :

- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Kab. Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong).
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Tanah Bumbu.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Kotabaru.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Tapin dan Hulu Sungai Selatan.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Hulu Sungai Tengah dan Balangan.

- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Hulu Sungai Utara dan Tabalong.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Tanah Laut.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Banjar.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Barito Kuala.
- Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong).
- Perencanaan DED Struktur Rumah Susun Sewa Gedung Asrama Putra dan Putri Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru.
- Kajian terhadap Rencana Organisasi Rusun ASN di Cempaka.
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Progam Pemerintah di Provinsi (Kab. Hulu Sungai Tengah dan Kab. Hulu Sungai Utara).
- Kajian/Study Perencanaan Prototype Pembuatan Rumah Sehat Tanggap Bencana Sederhana dengan Kearifan Lokal.

b) Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan

Pencapaian indikator Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 terealisasi sebesar 1 Dokumen dari target 1 Dokumen. Dengan demikian, persentase capaian indikator ini adalah 100%.

c) Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan

Pencapaian indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 terealisasi sebesar 10,93% dari target 10,76%. Indikator ini merupakan indikator negative (terbalik) dimana semakin kecil angkanya semakin baik sehingga persentase capaian indikator ini lebih dari 100%.

d) Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH

Pencapaian indikator Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH Tahun 2024 terealisasi sebanyak 50 Orang dari target 50 Orang, sehingga persentase capaian indikator Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH Tahun 2024 sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2024, Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti mencapai 13 dokumen dari target 15 dokumen (tercapai 86,67%). Capaian indikator sejenis dengan keluaran dokumen untuk di Tahun 2023 adalah 100%. namun di Tahun ini dokumen yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan Tahun lalu. Hal ini erat kaitannya dengan anggaran yang terus meningkat secara signifikan.

Dalam Renstra 2021 - 2026 target Dokumen yang dihasilkan selama 5 tahun sebanyak 30 dokumen perencanaan. Realisasi dari TA 2021, 2022, 2023 dan 2024 jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan mencapai 30 dokumen.

b) Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 2024, indikator Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan pencapaian dengan realisasi terkait.

c) Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 2024, indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target 100%. Capaian indikator ini di Tahun 2023 melebihi target 100%. Realisasi kinerja tahun ini cenderung meningkat sesuai dengan target jangka menengah sesuai dokumen perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah.

d) Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH

Pada tahun 2024, indikator Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH mencapai target 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan pencapaian dengan realisasi terkait.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan bidang perumahan sampai saat ini masih belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Hal ini salah satunya adalah belum adanya data yang lengkap dan akurat, untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan yang dapat memberikan data yang akurat untuk dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisiknya.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan data-data yang tepat dan akurat yang akan menjadi data dasar dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan di bidang perumahan.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka pencapaian indikator kinerja bidang perumahan adalah masih belum adanya database sebagai dasar dalam perencanaan, perbedaan data dasar pada masing-masing OPD maupun instansi vertikal, tidak lengkapnya data yang dibutuhkan di kabupaten/kota.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan melengkapi data-data dengan metode konsultasi, melakukan koordinasi dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi vertikal, melakukan koordinasi dengan asosiasi bidang perumahan, pihak swasta (CSR), dengan organisasi masyarakat dan lain sebagainya.

b) Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Jumlah Dokumen Data RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan tercapai 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan pencapaian dengan realisasi terkait.

c) Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan tercapai lebih dari 100%. Backlog perumahan terjadi disebabkan antara lain bertambahnya jumlah keluarga, adanya migrasi, terbatasnya lahan di perkotaan, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lembaga pembiayaan, harga rumah yang cenderung meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan akses ke lembaga pembiayaan (bank), melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perbankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan.

Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain tingginya harga rumah yang ditawarkan oleh pengembang perumahan, akses ke sumber pembiayaan, lokasi perumahan yang jauh dari pusat kegiatan, perekonomian, pendidikan serta luasan lahan yang bervariasi pada masing-masing daerah di kabupaten/kota.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pembiayaan (bank) dan pengembang dalam pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemerintah provinsi, asosiasi pengembang dan Bank Kalsel agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota terutama untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi PNS. Menyediakan land banking agar masyarakat dapat memperoleh perumahan dengan harga yang lebih rendah. Membuat regulasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

d) Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH

Indikator Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH Tahun 2024 tercapai 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan pencapaian dengan realisasi terkait.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Tahun 2024 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perumahan

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Perumahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Melaksanakan PKS antara Bank Pemerintah dengan Dinas Perkim untuk Penyaluran Bantuan RTLH	Jumlah PKS yang telah ditindaklanjuti	1	1	100
2.	Fasilitasi Bimtek dan	Jumlah Peserta	50	50	100

	Pendampingan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan RTLH	Bimtek yang Paham dan Mengerti			
3.	Melakukan Verifikasi Bagi Penerima Bantuan PK RTLH	Jumlah Dokumen BNBA yang telah diverifikasi sesuai dengan RC	1	1	100
4.	Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH Korban Bencana Provinsi	Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang ditingkatkan kualitasnya	750	740	98,67
Rata – Rata Capaian					99.67

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah PKS yang telah ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	1	1	100
2.	Jumlah Peserta Bimtek yang Paham dan Mengerti	-	-	-	-	-	50	50	100
3.	Jumlah Dokumen BNBA yang telah diverifikasi sesuai dengan RC	-	-	-	-	-	1	1	100
4.	Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang	256	77	137	136	260	750	740	98,67

	ditingkatkan kualitasnya								
	Rata – Rata Capaian								99.67

Sumber : Bidang Perumahan

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang ditingkatkan kualitasnya terealisasi sebanyak 740 unit dari target 750 unit sehingga persentase capaian indikator Jumlah unit RTLH Korban Bencana yang ditingkatkan kualitasnya tahun 2024 yaitu sebesar 98,67%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya

Capaian indikator jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 740 unit, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 (260 unit) maka capaian Tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah RTLH korban bencana yang sudah dilaksanakan rehabilitasi sebanyak 4.337 unit dari total rumah korban bencana sebanyak 7.177 unit. Sisa rumah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 2.840 unit.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya

Capaian dalam penanganan Rehabilitasi RTLH Korban Bencana untuk mencapai target didukung dengan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui Manajemen Pendampingan Fasilitator untuk melaksanakan verifikasi dan validasi calon Penerima Manfaat, pendistribusian bantuan kepada Penerima dan sampai pelaksanaan/pengawasan terhadap proses penyaluran Rehabilitasi

Upaya-upaya yang dilakukan berupa pendataan kembali dan memverifikasi rumah korban bencana yang belum tertangani hingga saat ini, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD terkait atau organisasi masyarakat atau CRS lainnya yang peduli terhadap

perumahan. Upaya yang lain mensosialisasikan/menyampaikan kepada calon penerima bantuan tentang proses pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi RTLH Korban Bencana.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana antara lain lokasi rumah yang tersebar di kabupaten/kota dan lokasi yang jauh dan susah dijangkau, kondisi rumah yang lebih rusak dari saat terjadi bencana, kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah, dan sering terjadi terdapat calon penerima bantuan yang sudah mendapat bantuan dari Instansi lain sehingga harus di verifikasi ulang.

Rencana tindak lanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana direncanakan di awal tahun anggaran sehingga masa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak dalam masa musim hujan. Pendataan dan verifikasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana di awal tahun agar perencanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Perumahan) Tahun 2024 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

5. Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19	39,19	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah luasan kawasan kumuh yang telah tertangani hingga Tahun } n}{\text{Jumlah luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100 \quad (12)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	-	26,92	30,93	34,97	39,19	39,19	100
Rata – Rata Capaian								100

Sumber : Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 39,19% dari target 39,19%, sehingga Persentase capaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani hingga Tahun 2024 teralisasi sesuai target yaitu 100%. Indikator

ini merupakan indikator positif yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik capaiannya. Rincian perhitungan indikator ini dapat dilihat dari formulasi sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah luasan kawasan kumuh yang telah tertangani hingga Tahun } n}{\text{Jumlah luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{310,2}{791,51} \times 100 = 39,19\%$$

Kawasan permukiman kumuh yang tertangani sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 39,19%. Rata-rata kenaikan target capaian dari tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sekitar 4% per tahunnya.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2024, indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 39,19%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu hanya 34,97%. Indikator ini merupakan indikator positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin bagus.

Dibandingkan di tahun sebelumnya luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani naik sekitar 4,22%, dari 35,20 Ha yang tertangani di tahun anggaran 2023 menjadi 33,40 Ha di tahun 2024. Apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya kenaikan capaian kinerja per tahun rata-rata sekitar 4% dan setiap tahun dapat tercapai setiap target yang telah direncanakan. Target yang telah ditetapkan telah sesuai dengan rencana strategi untuk jangka menengah, hal ini dilakukan untuk mencapai target pada akhir jangka menengah sebanyak 48,07% kawasan kumuh yang tertangani.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Hal-hal yang mendukung tercapainya target selain perencanaan yang baik tentu saja dengan cukupnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan, selain itu terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan juga dukungan dari masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai data terkait kawasan

kumuh selain itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas kawasan kumuh.

Hambatan yang ditemui dalam mencapai target tersebut antara lain ketersediaan data di Kabupaten/Kota yang kadang tidak lengkap selain itu tidak adanya pedoman dalam menghitung penanganan kawasan kumuh secara numerik.

Rencana tindak lanjut untuk mencapai target di tahun-tahun kedepan diperlukan penguatan data baseline kawasan permukiman khususnya kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu dengan pendataan yang baik dapat menjadi stok perencanaan untuk di tahun-tahun kedepan

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman) Tahun 2024 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kawasan Permukiman

- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	12	12	100
2	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	3	3	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	-	3	10	8	12	12	100
2.	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	-	3	3	3	3	3	100
Rata – Rata Capaian								100

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

- a) Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti

Pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti terealisasi sebanyak 12 dokumen dari target 12 dokumen. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti yaitu sebesar 100%.

Pada tahun 2024 dititikberatkan pada pendataan dan perencanaan sebagai stok program untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya, dari target awal hanya 7 dokumen hingga akhir tahun anggaran bisa mencapai 12 dokumen. Pada akhir anggaran jumlah dokumen yang dihasilkan mengalami kenaikan sebanyak 158,3% dari target awal.

- b) Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh

Pencapaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh terealisasi sebanyak 3 Kab./Kota dari target 3 Kab./Kota. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target

dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator ini sebesar 100%. Target awal dan target perubahan tidak mengalami perubahan karena jumlah Kab/Kota yang terverifikasi telah disesuaikan dengan rencana penyusunan review SK Kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Adapun, Kabupaten/Kota yang terverifikasi di Tahun Anggaran 2024 ini sebanyak 3 Kab/Kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti

Realisasi jumlah dokumen perencanaan/kajian kawasan permukiman kumuh dibandingkan tahun lalu meningkat signifikan, dibandingkan tahun lalu jumlah dokumen yang dihasilkan naik sekitar 66,6%. Pada tahun 2023 jumlah dokumen yang dihasilkan berjumlah 8 Dokumen dan pada akhir tahun 2024 jumlah dokumen yang dihasilkan mencapai 12 dokumen. Dokumen yang dihasilkan pada tahun anggaran 2024:

- Identifikasi dan Studi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan kabupaten Tanah Laut
- Identifikasi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai
- DED Kawasan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
- DED Kawasan Permukiman Kumuh Burum Kel. Tanjung Kabupaten Tabalong
- DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- DED Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Hambawang Barat Kabupaten Hulu sungai Tengah
- DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar
- Identifikasi dan Penyusunan DED Kawasan Perdesaan Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
- Review Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara
- Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data RTLH Kawasan Kumuh Provinsi (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan, Kab. Tabalong)

- Pendataan dan Validasi Data RTLH Kawasan Kumuh Provinsi (Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Balangan)
- Penyusunan Data Baseline Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin rata-rata per tahun menghasilkan 7 Dokumen perencanaan, namun pada tahun anggaran 2024 ini jumlah yang dihasilkan mencapai 12 Dokumen. Realisasi kinerja tahun 2024 ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah rata-rata target dokumen yang dihasilkan hanya 4 dokumen, sedangkan untuk tahun anggaran 2024 ini dapat menghasilkan 12 dokumen atau 3 kali lipat dari target jangka menengah.

b) Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh

Pada tahun 2024, Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh mencapai target 3 Kab./Kota. Jumlah Kabupaten/Kota yang terverifikasi di Tahun Anggaran 2023 juga sebanyak 3 Kab/Kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Realisasi kinerja baik di tahun lalu dan tahun anggaran 2024 tidak berubah tetap menargetkan 3 Kabupaten/Kota yang diverifikasi data luasan permukiman kumuh.

Dengan dilakukannya verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota adalah salah satu cara untuk mencapai target 48,07% kawasan permukiman kumuh yang tertangani sesuai dengan target jangka menengah. Apabila kita bandingkan capaian tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi target sudah sesuai dengan rencana.

Sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perkim 2021 - 2026 yaitu melakukan pendampingan terhadap pemerintah Kab/Kota sehingga sejak Tahun 2022, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman lebih banyak mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti aturan dalam proses Verifikasi dan Penentuan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti

Capaian realisasi ini tentu saja tidak terlepas dari proses perencanaan yang matang, termasuk identifikasi kebutuhan dan penyusunan roadmap penyediaan dokumen sejak awal tahun serta pemetaan lokasi kawasan prioritas yang tepat. Hal ini tentu saja didukung oleh kerjasama yang solid antara pemerintah kabupaten/kota, pusat, dan lembaga terkait lainnya serta pelibatan masyarakat dalam proses kajian sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat diimplementasikan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target ini antara lain:

- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pereemajaan/ Peemukiman Kembali Permukiman Kumuh
- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target antara lain melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan serta melakukan audiensi bersama Direktorat Pengembangan Kawasan Kementerian PUPR.

Hambatan yang sering ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain pemenuhan data-data dukung dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun kajian. Selain itu data-data yang tersedia sering kali merupakan data lama sehingga diperlukan updating data. Ketersediaan data merupakan hal yang penting dalam perencanaan, sehingga sebagai rencana tindak lanjut pada tahun anggaran selanjutnya dengan menitik beratkan pada pendataan kawasan permukiman dengan menyusun dokumen/ kajian kawasan permukiman sebagai stok perencanaan.

b) Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh

Tercapainya target didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah kabupaten/Kota. Seperti halnya capaian

penyusunan Dokumen Perencanaan, target kabupaten/Kota yang terverifikasi ini didukung oleh kegiatan:

- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pereemajaan/ Peemukiman Kembali Permukiman Kumuh
- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Upaya yang dilakukan untuk mencapai terget tersebut adalah dengan melakukan pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat

Rencana tindak lanjut pada tahun anggaran selanjutnya akan dilaksanakan review Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Provinsi setelah seluruh hasil verifikasi kabupaten/kota yang telah diverifikasi di tahun-tahun sebelumnya diinventaris.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman) Tahun 2024 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Kawasan Permukiman

- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Melaksanakan Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	33,60	33,40	99,40
2.	Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	115	114	99,13
Rata – Rata Capaian					99,27

Sumber : Seksi Penataan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	-	36,19	30,00	32,00	33,60	33,40	99,40
2.	Jumlah Unit RTLH dalam	-	-	-	280	115	114	99,13

	Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya							
Rata – Rata Capaian								99,27

Sumber : Seksi Penataan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi penanganan kawasan kumuh pada TA 2024 hanya mencapai 99,40%, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata realisasi kinerja bisa mencapai 100%. Namun realisasi penanganan kawasan kumuh ini tidak mempengaruhi Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani karena gap tidak terlalu signifikan.

Realisasi unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani TA 2024 yang ditargetkan 115 unit namun yang dapat terealisasi berjumlah 114 unit, persentase capaian kinerja mencapai 99,13%. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja mencapai 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

- a) Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya.

Dibandingkan dengan TA 2023 realisasi pada TA 2024 menurun 0,60% atau selisih target kinerja kawasan kumuh yang tertangani yang tidak tercapai 0,20 Ha. Berdasarkan data rata-rata capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mencapai 100% sesuai dengan target setiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD dengan realisasi TA 2024 33,40 Ha tidak memberikan pengaruh terhadap target yang sudah ditetapkan karena masih sesuai dengan target awal penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan.

- b) Jumlah Unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya

Capaian target kinerja pada tahun 2024 ini sedikit menurun dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya, pada tahun sebelumnya capaian kinerja mencapai 100% dan pada tahun 2024 hanya mencapai 99,10%.

Berdasarkan data rata-rata capaian kinerja dari pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2024 jumlah RTLH yang tertangani hanya 114 unit dikarenakan salah satu penerima bansos yang terlibat hukum sehingga proses penyaluran bansos dibatalkan. Dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2024 ini ditargetkan penanganan RTLH pada kawasan kumuh sudah mencapai 31,39% namun realisasi capaian hingga tahun 2024 baru mencapai 23,73%.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a) Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Penataan dan Penanganannya.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan jarak waktu antara pengesahan APBDP 2024 dan pelaksanaan pekerjaan sangat pendek sehingga tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan berkonsultasi dengan pihak Pokja PBJ mengenai proses pengadaan yang dapat diambil untuk dapat melaksanakan pekerjaan agar target kinerja tetap tercapai.

Hambatan yang ditemui dalam mencapai indikator kinerja salah satunya adalah Waktu pengesahan APBDP dan pelaksanaan sangat pendek sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Adapun Tindak lanjut yang dilakukan yaitu Kegiatan yang tidak dilaksanakan dimasukkan kembali dalam perencanaan TA 2025.

- b) Jumlah Unit RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya

Penyebab tidak tercapainya kinerja disebabkan oleh faktor eksternal dimana salah satu penerima bansos yang telah direncanakan terlibat masalah hukum sehingga bantuan sosial yang direncanakan

dibatalkan untuk disalurkan. Upaya yang telah dilakukan yaitu Melakukan koordinasi dengan tim fasilitator lapangan untuk dapat melaksanakan seluruh perbaikan RTLH sesuai dengan target.

Hambatan yang ditemui dalam mencapai indikator kinerja salah satunya adalah penggantian nama pada penerima hibah bansos tidak dapat dilakukan setelah pengesahan anggaran sehingga apabila penerima bansos meninggal dunia atau mengalami masalah hukum tidak dapat dilakukan penggantian nama secara langsung. Adapun Tindak lanjut yang dilakukan yaitu Melakukan evaluasi pelaksanaan perbaikan RTLH dan melakukan verifikasi lapangan serta berkonsolidasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan perbaikan RTLH.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Tahun 2024 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Kawasan Permukiman

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

6. Eselon III (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	48,8	48,04	98,44
Rata – Rata Capaian					98,44

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum :

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah Permukiman yang ditangani}}{\text{Jumlah permukiman yang didukung PSU}} \times 100 \quad (13)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	72,00	89,93	45,73	47,49	48,8	48,04	98,44
Rata – Rata Capaian								98,44

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Indikator Kinerja Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan Jumlah Permukiman yang Ditangani hingga Tahun 2024 sebanyak 4.780 unit dibandingkan dengan Jumlah Permukiman yang Didukung PSU yang sebanyak 9.949 Unit.

$$(\%) = \frac{\text{Jumlah Permukiman yang ditangani}}{\text{Jumlah permukiman yang didukung PSU}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{4.780}{9.949} \times 100 = 48,04\%$$

Tabel III.5 Jumlah Permukiman yang didukung PSU

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG PSU (UNIT)
1	BANJARMASIN	JALAN	1.497,7	131
2	BANJARBARU	JALAN	5.275,7	458
		PSU (SANITASI)	-	2
3	TAPIN	JALAN	5.096,2	483
4	TANAH LAUT	JALAN	20.702,89	638
5	TANAH BUMBU	JALAN	4.589,5	461
6	TABALONG	JALAN	2035	177
7	HULU SUNGAI UTARA	JALAN	2.203,6	191
8	HULU SUNGAI TENGAH	JALAN	2.802,6	243
9	HULU SUNGAI SELATAN	JALAN	6.015,5	1.522
10	BARITO KUALA	JALAN	10.847,4	2.942
11	BALANGAN	JALAN	1.245	108
12	BANJAR	JALAN	16.196,36	2.246
		PSU (SANITASI)	-	1
13	KOTABARU	JALAN	3.699	321
		PSU (RTNH)	-	25
TOTAL			82.206,45	9.949

Sumber : Bidang PSU Permukiman

Tabel III.6 Jumlah Permukiman yang ditangani/didukung PSU nya s.d Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (UNIT)
1	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 SD. 2019	3.050
2	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020	433

3	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021	867
4	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022	200
5	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023	175
6	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	55
TOTAL		4.780

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Permukiman

Indikator Kinerja Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan Jumlah Permukiman yang Ditangani hingga Tahun 2024 sebanyak 4.780 unit dibandingkan dengan Jumlah Permukiman yang Didukung PSU yang sebanyak 9.949 Unit. Pencapaian indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terealisasi sebesar 48,04% dari target 48,80 %. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mencapai target yaitu 98,44 %.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2024, indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan terealisasi sebesar 48,04%. Pada tahun 2023, realisasi persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah 47,49%.

Realisasi persentase meningkatnya kualitas dalam penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota, pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah merupakan target dalam Renstra 2022-2026.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan PSU permukiman, dan kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman,

Penyediaan PSU Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman, serta kegiatan koordinasi dalam rangka Penyediaan PSU Permukiman. Faktor keberhasilan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan adalah terjalinnya koordinasi antar instansi dalam rangka perencanaan dan penanganan PSU dan ketersediaan anggaran dalam rangka penuntasan dan percepatan penanganan PSU Permukiman di kab/Kota.

Pelaksanaan pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2024. Hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja diantaranya Belum memadainya penanganan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

Upaya peningkatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman. Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman) Tahun 2024 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

- 1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	14	14	100
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	3	3	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	-	3	6	9	14	14	100
2.	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	-	3	3	3	3	3	100
Rata – Rata Capaian								100

Sumber : Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti terealisasi sebanyak 14 dokumen dari target 14 dokumen. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti yaitu sebesar 100 %.

Pencapaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman terealisasi sebanyak 3 Kab./Kota dari target 3 Kab./Kota. Persentase capaian indikator kinerja Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2024, Capaian indikator Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti mencapai 14 dokumen (100 %). Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 yang hanya berjumlah 9 dokumen.

Realisasi dokumen perencanaan mulai dari tahun 2021 terus meningkat, dikarenakan kebutuhan perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik penanganan PSU permukiman di kab/kota. pada tahun 2021, realisasi dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen, dan pada tahun 2022, realisasi dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen, sedangkan tahun 2023, realisasi dokumen perencanaan sebanyak 9 dokumen dan pada Tahun 2024, realisasi dokumen perencanaan sebanyak 14 dokumen.

Dokumen perencanaan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut pekerjaan penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota, pada Tahun 2022 dan prioritas tahun 2023 adalah merupakan prioritas target dalam Renstra 2022-2026.

b) Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data PSU Permukiman

Pada tahun 2024, Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data PSU Permukiman berjumlah 3 Kab./Kota, capaian ini besarnya sama dengan kinerja di Tahun 2023. Kab/Kota yang telah melakukan verifikasi sebanyak 3 Kab, yaitu:

- Kabupaten Banjar;
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Barito Kuala

Pelaksanaan verifikasi kab/kota dalam penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota, pada Tahun 2022 dan prioritas tahun 2023 & 2024 adalah merupakan target dalam Renstra 2022-2026.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti

Indikator Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan pencapaian indikator sejenis di tahun sebelumnya. Peningkatan capaian indikator kinerja terjadi karena pergeseran anggaran saat Tahun Anggaran Perubahan 2024.

Kegiatan perencanaan PSU permukiman merupakan tindak lanjut dari usulan Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/kota, yang telah dilaksanakan koordinasi dan verifikasi lokasi usulan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PSU Permukiman. Pada Tahun 2024, kegiatan perencanaan melebihi target awal yaitu hanya 6 dokumen, menjadi 9 dokumen.

Upaya Upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya Masih belum efektif nya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Rencana tindak lanjut Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti diantaranya Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

b) Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman

Kegiatan perencanaan PSU permukiman merupakan tindak lanjut dari usulan Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/kota, yang telah dilaksanakan koordinasi dan verifikasi lokasi usulan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PSU Permukiman.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya Belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

Upaya dalam menghadapi hambatan yg dialami diantaranya:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian indikator ini diantaranya Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman) Tahun 2024 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Melaksanakan penanganan Prasarana,	Jumlah panjang Jalan dan Drainase	14.000	10.254	73,24

	Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Kalimantan Selatan	yang Ditangani			
	Melakukan Pendataan PSU Perumahan yang sudah diserahkan	Jumlah dokumen data PSU Perumahan yang dilakukan serah terima	1	1	100
Rata – Rata Capaian					86,62

Sumber : Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani	7.340,8	2.053,4	2.053,4	9.471	14.294	14.000	10.254	73,24
2.	Jumlah dokumen data PSU Perumahan yang dilakukan serah terima	-	-	-	-	-	1	1	100
Rata – Rata Capaian									86,62

Sumber : Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

- (1) Perbandingan Realisasi dengan target
- (2) Pencapaian indikator Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani yang dikerjakan sesuai standar terealisasi sepanjang 10.254 m dari target 14.000 m. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani yang dikerjakan sesuai standar yaitu sebesar 73,24 %.

Tabel III.7 Sebaran Panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani di Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KOMPONEN	PANJANG (m)
1	BANJARMASIN	Jalan	1.397
2	BANJARBARU	Jalan	150
3	TAPIN	Jalan	184
4	TANAH LAUT	Jalan	7.244
5	TANAH BUMBU	-	-
6	TABALONG	Jalan	145
7	HULU SUNGAI UTARA	Jalan	1.018
8	HULU SUNGAI TENGAH	Jalan	64
9	HULU SUNGAI SELATAN	Jalan	150
10	BARITO KUALA	Jalan	1.614
11	BALANGAN	-	-
12	BANJAR	Jalan	2.328
13	KOTABARU	-	-
TOTAL			14.294

Sumber : Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

- (3) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

- a) Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani

Kegiatan penanganan PSU permukiman mengalami penurunan kinerja hingga 73,24 % dikarenakan penambahan pagu anggaran pada kegiatan anggaran perubahan 2024, namun tidak dapat terlaksana. Upaya yang telah dilakukan yaitu Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan

Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

Hambatan dalam pelaksanaan yaitu Masih belum efektif nya pelaksanaan anggaran serta penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota. Tindak lanjut pekerjaan penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota yaitu rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

b) Jumlah dokumen data PSU Perumahan yang dilakukan serah terima

Realisasi Jumlah lokasi permukiman yang ditangani pada tahun 2023 adalah 25 lokasi, dibandingkan target yaitu 15 lokasi. Sedangkan pada tahun 2022, belum ada target dalam jumlah lokasi permukiman . Hal ini menunjukkan realisasi capaian pada tahun 2023 meningkat sebesar 60% dibandingkan target awal.

Realisasi jumlah lokasi permukiman yang ditangani mulai dari tahun 2023 terus meningkat, dikarenakan kebutuhan pelaksanaan penanganan PSU permukiman di kab/kota yang harus ditangani semakin besar. pada tahun 2023, realisasi realisasi panjang jalan adalah 25 lokasi, dibandingkan target awal 15 lokasi. Hal ini menunjukkan realisasi lokasi permukiman yang ditangani setiap tahunnya meningkat.

Tindak lanjut pekerjaan penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota, pada Tahun 2023 adalah merupakan prioritas target dalam Renstra 2022-2026.

(4) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani

Kegiatan penanganan PSU permukiman mengalami peningkatan kinerja hingga 158,27 % dikarenakan penambahan pagu anggaran pada kegiatan anggaran perubahan 2023. Upaya yang telah dilakukan yaitu Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah

dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman serta Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

Hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

- Belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Masih belum efektif nya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya SDM dalam proses penanganan dalam rangka penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Rencana Tindak Lanjut yang akan di giatkan oleh Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman yaitu Upaya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman, Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

- b) Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman

Kegiatan penanganan PSU permukiman mengalami peningkatan kinerja dengan target dan realisasi lokasi sebesar 25 lokasi dikarenakan penambahan pagu anggaran pada kegiatan anggaran perubahan 2023 yang semula ditargetkan 20 lokasi di APBD Murni 2023.

Upaya Upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Hambatan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu

- Belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Masih belum efektif nya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya SDM dalam proses penanganan dalam rangka penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Rencana Tindak Lanjut kedepannya yaitu Upaya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman dan juga Inventarisasi lokasi permukiman yang belum dilaksanakan penanganan PSU Permukiman.

(5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman) Tahun 2023 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- (i) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

B. Akuntabilitas Keuangan**1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024**

Pagu awal DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar **Rp 71.581.217.200,00**. Dengan pertimbangan untuk penyelesaian target kinerja RPJMD, pada Anggaran 2024 Perubahan kemudian pagu DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah menjadi **Rp 108.426.286.950,00** dengan realisasi sebesar **Rp 67.693.083.551,00**. Rincian pagu per program SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pagu sebesar Rp 12.143.134.950,00 dengan realisasi Rp 10.191.047.270,00.
- 2) Program Pengembangan Perumahan, pagu sebesar Rp 22.427.876.000,00 dengan realisasi Rp 21.454.142.185,00.
- 3) Program Kawasan Permukiman, pagu sebesar Rp 13.750.648.000,00 dengan realisasi Rp 11.881.336.314,00.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pagu sebesar Rp 60.104.628.000,00 dengan realisasi Rp 24.166.557.782,00.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu 2 (dua) Sasaran strategis yang harus dicapai terkait urusan permukiman dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu

- 1) Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dengan didukung melalui 3 (tiga) Program Teknis dan
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana yang didukung oleh 1 (satu) Program Teknis.

Penyerapan anggaran menurut sasaran dan program di Tahun 2024 yakni sebesar 62.43 % dengan rincian serapan terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program SKPD

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Program Pengembangan Perumahan	22.447.876.000	21.454.142.185	95.57
		Program Kawasan Permukiman	13.750.648.000	11.881.336.314	86.41
		Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	60.104.628.000	24.166.557.782	40.21

3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Sejak Tahun 2019, dilakukan pengurangan jumlah kegiatan yang cukup signifikan terutama kegiatan yang menunjang sasaran dan program strategis SKPD dengan menggabungkan kegiatan yang sejenis (re-grouping), sehingga pembagian paket lokasi pekerjaan ada di dalam 1 (satu) Dokumen Anggaran Sub Kegiatan. Pelaksanaan re-grouping kegiatan sejenis ini berdampak bagus pada pengefektifan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Program dan kegiatan yang menunjang tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak Tahun 2021 berubah drastis dikarenakan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan yang digunakan harus mengacu pada nomenklatur yang telah disediakan oleh Peraturan tersebut. Nomenklatur sub kegiatan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah mengalami perubahan sejak Keputusan Awal Tahun 2021. Adapun untuk Nomenklatur Sub Kegiatan Tahun 2024 tidak sama jika

dibandingkan dengan Nomenklatur Tahun 2023 dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pada Kepmendagri tersebut untuk urusan Perumahan dan Permukiman saat penyusunan RENJA Tahun 2024. Ada beberapa sub kegiatan yang dihilangkan dan ada juga penambahan nomenklatur baik itu kegiatan maupun sub kegiatan baru.

Perubahan nomenklatur yang cukup banyak ada di Program Perumahan dan Program Kawasan Permukiman. Pada Program Perumahan, Kepmendagri memisahkan antara sub kegiatan yang mengatur Korban Bencana dengan Korban Relokasi Program Provinsi dan menambah Kegiatan baru terkait pendistribusian dan serah terima bantuan bagi korban bencana atau relokasi program provinsi. Sama halnya dengan Program Perumahan, Nomenklatur pada Program Kawasan Permukiman juga ada yang hilang dan bertambah salah satunya yaitu tambahan sub kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh.

Berbeda dengan Tahun 2023, Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tahun Anggaran 2024 tidak dilakukan oleh SKPD namun dilakukan melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan Mobil / Kendaraan Dinas yang diperlukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kendaraan Dinas Operasional untuk menunjang Penyambutan Pegawai Pusat setara Eselon I. Selain itu, untuk Program PSU Permukiman ada 1 (satu) sub kegiatan baru yaitu Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang yang dilaksanakan di Tahun 2024. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	2023			2024		
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Pengadaan Mebel			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Pengembangan Perumahan			Program Pengembangan Perumahan		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana

			Sebelumnya yang Belum Tertangani			Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan

			Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana			Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP			
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			

			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
	Program Kawasan Permukiman			Program Kawasan Permukiman		
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman kumuh			
			Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP			Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai			

			dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

TOTAL PROGRAM TAHUN 2023	TOTAL KEGIATAN TAHUN 2023	TOTAL SUB KEGIATAN TAHUN 2023	TOTAL PROGRAM TAHUN 2024	TOTAL KEGIATAN TAHUN 2024	TOTAL SUB KEGIATAN TAHUN 2024
4	13	41	4	13	43
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2023			TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2024		
PAGU DANA		REALISASI	PAGU DANA		REALISASI
Rp 75.439.074.200,00		Rp 70.770.682.558,00	Rp 108.446.286.950,00		Rp 67.693.083.551,00

Tabel Perbandingan Pagu Belanja Langsung Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	2023		2024	
	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH (Rp)	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.661.664.200,00	Belanja Pegawai	6.873.533.750,00
2	Belanja Barang dan Jasa	15.555.900.900,00	Belanja Barang dan Jasa	23.928.996.400,00
3	Belanja Hibah	42.700.000.000,00	Belanja Hibah	59.292.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.800.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial	17.280.000.000,00
5	Belanja Modal	721.509.100,00	Belanja Modal	1.051.756.800,00
TOTAL		75.439.074.200,00	TOTAL	108.426.286.950,00

4. Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Untuk mengefektifkan pencapaian target dan sasaran strategis, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan evaluasi terhadap sub kegiatan yang menunjang fungsi organisasi. Pada Tahun 2024, SKPD mengeliminasi sub kegiatan yang kurang berkontribusi dalam pencapaian target organisasi namun juga menambah sub kegiatan baru yang sebagian besar terkait dengan upaya tindak lanjut pencapaian kinerja organisasi dua diantaranya adalah sub kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi dan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh.

Di akhir tahun anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan dana tambahan untuk mengakomodir usulan reses pikir Dewan sehingga anggaran SKPD pun menjadi bertambah dari semula Rp 71.581.217.200,00 menjadi Rp 108.426.286.950,00.

Sama halnya di Tahun 2023, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar untuk menuntaskan target penanganan PSU di permukiman pada periode Anggaran 2024, berbeda

dengan Tahun 2022 dimana Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang mendapatkan pagu paling besar untuk penuntasan permukiman kumuh. Adapun di Tahun 2024, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran yang paling kecil dikarenakan penanganan kumuh kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan sudah semakin berkurang. Di Tahun 2025 nanti penanganan RTLH yang dilakukan Bidang Perumahan akan lebih banyak daripada Tahun ini sehingga anggaran Bidang Perumahan di Tahun 2025 akan jauh meningkat.

Tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan Tahun 2024

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persentase %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.143.134.950	10.191.047.270	83,92
2	Program Pengembangan Perumahan	22.427.876.000	21.454.142.185	95,57
3	Program Kawasan Permukiman	13.750.648.000	11.881.336.314	86,41
4	Program Peningkatan Prasaranasarana dan Utilitas Umum (PSU)	60.104.628.000	24.166.557.782	40,21

Tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024

2023			2024		
Total Program	Total Kegiatan	Total Sub Kegiatan	Total Program	Total Kegiatan	Total Sub Kegiatan
4	13	41	4	13	43
Total Anggaran Belanja Langsung			Total Anggaran Belanja Langsung		
PAGU		REALISASI	PAGU		REALISASI
75.439.074.200,00		70.770.682.558,00	108.426.286.950,00		67.693.083.551,00

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	2023			2024		
	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.661.664.200	5.313.310.486	Belanja Pegawai	6.873.533.750	5.770.301.052
2	Belanja Barang dan Jasa	15.555.900.900	14.557.284.471	Belanja Barang dan Jasa	23.928.996.400	18.986.889.674
3	Belanja Hibah	42.700.000.000	39.436.213.601	Belanja Hibah	59.292.000.000	24.859.952.825
4	Belanja Bantuan Sosial	10.800.000.000	10.800.000.000	Belanja Bantuan Sosial	17.280.000.000	17.080.000.000
5	Belanja Modal	721.509.100	663.910.000	Belanja Modal	1.051.756.800	995.940.000
TOTAL		75.439.074.200	70.770.682.558	TOTAL	108.426.286.950	67.693.083.551

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa sebagian besar anggaran per jenis belanja yang dialokasikan telah diserap dengan baik menurut peruntukannya, kecuali Belanja Hibah. Adapun persentase penyerapan anggaran Tahun 2024 (62,43%) jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran Tahun 2023 yang mencapai 93,81%. Hal ini terjadi dikarenakan tambahan pagu saat perubahan 2024 tidak bisa diserap maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan periode perubahan yang terlalu singkat dan adanya kebijakan terkait pengadaan jasa konstruksi melalui e-katalog yang ditangguhkan sehingga paket pekerjaan yang nilainya cukup besar tidak bisa dilaksanakan.

5. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya selalu dipertimbangkan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2024, terutama dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip efisien dan efektif selalu diterapkan oleh pelaku pengadaan sehingga tidak ada dana yang disia-siakan. Efisiensi dan Efektivitas yang telah diupayakan di Tahun 2024 diantaranya:

- 1) Pengadaan Barang melalui e-Katalog seperti makan minum, Alat Tulis, Peralatan kebersihan, peralatan komputer dan lain-lain diproses sesuai kebutuhan dan negosiasi selalu dilakukan untuk mencegah pemborosan.
- 2) Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak lagi diberikan untuk kendaraan jabatan dikarenakan sesuai arahan bahwa BBM Operasional sudah termasuk dalam anggaran pemeliharaan sarana, prasarana.
- 3) Pencegahan pemborosan selanjutnya ada pada Belanja Internet pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Hal ini dikarenakan Pembayaran Internet telah dibebankan pada anggaran Diskominfo.
- 4) Belanja hadiah Lomba Hari Habitat Sedunia 2024 tidak dikeluarkan dikarenakan Pengumuman pemenang lomba baru diumumkan pada bulan Oktober sehingga untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan fisik apabila dilaksanakan bersamaan waktunya tidak mencukupi, sehingga agar efektif pelaksanaan fisik lomba di pindahkan di TA 2025. Untuk mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik dibutuhkan waktu yang mencukupi, apabila kualitas tidak memenuhi standar maka akan terjadi pemborosan.
- 5) Penghematan belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni juga tidak diserap karena Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada satu tempat dengan mengundang kabupaten/kota sehingga lebih efektif. Sama halnya pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Evaluasi Program PKP pada Kab./Kota yang tidak diserap karena Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dilaksanakan pada satu tempat dengan mengundang kabupaten/kota.
- 6) Di Tahun 2024, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar untuk menuntaskan target penanganan PSU di permukiman. namun pada pelaksanaan nya tidak dapat dilaksanakan karena kendala evaluasi sistem dalam pengadaan barang jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama Eselon II, 8 (delapan) indikator kinerja Eselon III dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja eselon IV secara keseluruhan dicapai dengan kategori Sangat Memuaskan yaitu 100 %. Rincian pencapaian sasaran dengan total 29 (tiga puluh) indikator yaitu sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) indikator berhasil mencapai kategori sangat memuaskan,
2. 1 (satu) indikator yang mencapai target Sangat Baik
3. 1 (satu) indikator yang mencapai target Baik
4. 1 (satu) indikator masih dalam proses penilaian (SAKIP).

Isu strategis utama yang menjadi fokus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah mengurangi angka backlog penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan, disusul dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas fasilitas umum permukiman.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam memaksimalkan pencapaian kinerja antara lain:

1. Memfasilitasi penyediaan perumahan formal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada perumahan swadaya
3. Melakukan penataan dan pengembangan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan
4. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum permukiman yang memenuhi standart melalui pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman
5. Menyusun regulasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman
3. Kerjasama antar instansi pemerintah daerah dalam penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya regulasi tentang penanganan perumahan dan kawasan permukiman kepada Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Februari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan  Ir. MURSYIDAH AMINY, M.T. NIP. 19660330 199703 2 002
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 71).

Keterkaitan :

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.



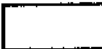

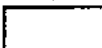



Kualifikasi Pelaksana :

- a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
- b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memahami dengan akuntabilitas kinerja dan indikator-indikator kinerja; dan
- d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja.

Peralatan / Perlengkapan :

- a. perangkat komputer; dan
- b. lemari arsip (*filing cabinet*).

Pencatatan Dan Pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	Bidang- Bidang	Sekretaris	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memberikan arahan kepada staf mengenai form permintaan data capaian kinerja					Form permintaan data capaian kinerja	10 menit	Arahan mengenai form permintaan data capaian kinerja	
2	Menginstruksikan agar menyampaikan form permintaan data capaian kinerja ke masing-masing bidang					Form permintaan data capaian kinerja	5 menit	Instruksi Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset	
3	Menyampaikan form permintaan data capaian kinerja					form permintaan data capaian kinerja dan instruksi kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	15 menit	Tanda terima penyampaian form data capaian kinerja	
4	Menyampaikan data capaian kinerja					form permintaan data capaian kinerja data capaian kinerja	20 Menit	Data capaian kinerja dari bidang-bidang	
5	Menghimpun data capaian kinerja dari biang-bidang					Data capaian kinerja dari biang-bidang	30 menit	Himpunan data capaian kinerja bidang-bidang	
6	Mengkompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang					data capaian kinerja dari bidang-bidang	15 menit	Hasil kompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang	
7	Menganalisa dan mengevaluasi hasil kompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang					Hasil kompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang	20 menit	Hasil analisa dan evaluasi kompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang	
									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Membuat draft laporan capaian kinerja		<pre>graph TD; 8{{8}} --> B1[]; B1 --> B2[]; B2 --> B3[]; B3 --> B4[]; B4 --> B5[]; B5 --> 13([13]);</pre>		Hasil analisa dan evaluasi kompilasi data capaian kinerja dari bidang-bidang	30 Menit	Draft laporan capaian kinerja		
9	Memeriksa draft Laporan Capaian Kinerja					Draft laporan capaian kinerja	15 Menit	Hasil pemeriksaan draft Laporan Capaian Kinerja	
10	Memeriksa draft Laporan Capaian Kinerja					Draft laporan capaian kinerja	15 Menit	Hasil pemeriksaan draft Laporan Capaian Kinerja	
11	Memperbaiki draft Laporan Capaian Kinerja dan membuat draft surat pengantar Laporan Capaian Kinerja					Hasil pemeriksaan draft Laporan Capaian Kinerja	20 Menit	Hasil perbaikan draft Laporan Kinerja dan draft surat pengantar Laporan Capaian Kinerja	
12	Memeriksa dan memaraf draft surat pengantar dan draft Laporan Capaian Kinerja					Hasil perbaikan draft Laporan Kinerja dan draft surat pengantar Laporan Capaian Kinerja	15 Menit	Draft surat pengantar dan draft Laporan Capaian Kinerja diparaf	SOP Administrasi Surat Keluar
13	Menginput capaian kinerja pada aplikasi E-Sakip.					Laporan Capaian Kinerja	30 menit	Laporan Capaian Kinerja SKPD pada E-Sakip telah diinput	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 7 Banjarbaru, 70711
Telp./ Fax. (0511) 4772044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 600.2.1/065/DISPERKIM/2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Untuk itu perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reupublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;


- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022, tanggal 30 Maret 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
- 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2020;
- 25. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.3.1/01082/KUM/2023, Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 26. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.3.1/KUM/01083/KUM/2023, Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (DPA APBD SKPD) Tanggal 02 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
- PERTAMA : Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dengan Pedoman sesuai dengan aturan yang berlaku dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sebagaimana Lampiran 1 pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 02 Januari 2024.

KETIGA : Keputusan ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DINAS,

MURSYIDAH AMINY, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199703 2 002


- Tembusan :
- 1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
 - 2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
 - 3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
 - 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

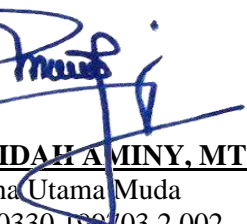
Lampiran

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
Nomor : 600.2.1/065/DISPERKIM/2023
Tanggal : 29 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Jabatan dalam SKPD	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Perumahan	Koordinator Bidang Perumahan
6.	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinator Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
9.	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh	Anggota
10.	Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman	Anggota
11.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	Koordinator Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
12.	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman	Anggota
13.	Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	Anggota



KEPALA DINAS,

MURSYIDAH AMINY, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199703 2 002

CROSS CUTING KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LEVEL II

Mendukung IKU Eselon II

Kinerja untuk mencapai / mendukung KU SKPD Level I

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	TARGET	INITIATIVE
Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,70	Melakukan perbaikan SAKIP dari hasil review tim evaluasi PAN RB
Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	TARGET	INITIATIVE
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Dinas	93%	Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana Dinas
Peningkatan Kualitas SDM Dinas	TARGET	INITIATIVE
Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Dinas	100%	Melakukan money data pegawai ASN Dinas dalam peningkatan kualitas SDM
Pelayanan Administrasi Keuangan	TARGET	INITIATIVE
Persentase Penyerapan Anggaran Dinas	93%	Mengevaluasi Laporan RFK / SPJ setiap bulan pada
Persentase Aset yang Tercatat	100%	Mengevaluasi pencatatan aset yang dilakukan Bendahara Barang

Menyediakan perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	TARGET	INITIATIVE
Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	18 Dokumen	Mengevaluasi dokumen perencanaan sesuai ketentuan
Menyediakan perencanaan dan administrasi keuangan dan aset SKPD	TARGET	INITIATIVE
Jumlah dokumen laporan keuangan Secara berkala	5 Dokumen	Memeriksa laporan rekon dan keuangan secara berkala
Jumlah aset yang tercatat	110 Unit	Memeriksa Pencatatan Aset

Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	TARGET	INITIATIVE
Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	4 Dokumen	Memeriksa pengarsipan surat menyurat secara berkala
Menyediakan data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	TARGET	INITIATIVE
Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara terib	68 Orang	Mengevaluasi data pegawai dan administrasi kepegawaian dinas

- Terdapat Pekerjaan PK RTLH Pemenuhan SPM Perumahan

Meningkatkan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan	TARGET	INITIATIVE
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	48,02%	Peningkatan Kualitas RTLH

- Terdapat Pekerjaan PK RTLH Kawasan Permukiman Kumuh

Menganalisa Dokumen Perencanaan/Kajian Urusan Perumahan	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	15 Dok	Melakukan analisa dokumen perencanaan bidang perumahan
Melakukan Pendataan RTLH secara Berkala	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen Data RTLH di Prov. Kalsel	1 Dok	Pendataan dan Pelaksanaan SPM Perumahan Kab./Kota
Fasilitasi Sosialisasi Akses dalam Pemenuhan Rumah	TARGET	INITIATIVE
Penurunan backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	10,76%	Sosialisasi Akses Pemenuhan Rumah
Melaksanakan Sosialisasi Prosedur Usulan RTLH	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Peserta yang mengetahui usulan RTLH	50 Orang	Sosialisasi Usulan RTLH

Melaksanakan PKS antara Bank Pemerintah dengan Dinas Perkim untuk	TARGET	INITIATIVE
Jumlah PKS yang telah ditindaklanjuti	1 Dok	PKS Penyaluran Bantuan RTLH
Fasilitasi Bimtek dan Pendampingan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan RTLH	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Peserta Bimtek yang Faham dan Mengerti	50 Orang	Bimtek Pelaksanaan Bantuan PK RTLH
Melakukan Verifikasi Bagi Penerima Bantuan PK RTLH	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen BNBA yang telah diverifikasi sesuai dengan RC	1 Dok	Verifikasi data BNBA sesuai RC
Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH Korban Bencana Provinsi	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Unit RTLH Korban Bencana yang Ditingkatkan Kualitasnya	750 Unit	PK-RTLH dengan Rehab Atap, Lantai & Dinding

LEVEL I

Kinerja Utama SKPD

Mendukung IKU Eselon II

Mendukung IKU Eselon II

Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	TARGET	INITIATIVE
Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19%	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai 7 + 1 Indikator

Meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	TARGET	INITIATIVE
Persentase Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	47,66%	Penanganan PSU Permukiman sesuai 7 Komponen PSU

- Jenis Pekerjaan yaitu 7 Indikator Kawasan Permukiman Kumuh adalah salah satunya Jalan
- Jenis Pekerjaan yaitu 7 Komponen PSU Permukiman adalah salah satunya Jalan
- Pekerjaan Jalan merupakan salah satu indikator yang memberikan dampak optimal dalam pengurangan tingkat kekumuhan

LEVEL III

Kinerja yang harus ada untuk mencapai kinerja di level II

Menganalisa Dokumen Perencanaan/Kajian Penanganan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti	9 Dok	Mengevaluasi dokumen perencanaan Penanganan PSU Permukiman
Melakukan Pendataan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen data kondisi PSU Permukiman	1 Dok	Data Kondisi PSU Permukiman
Melakukan Verifikasi PSU Permukiman	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data PSU Permukiman	3 Kab./Kota	Melakukan verifikasi PSU Permukiman di Kab./Kota

Menganalisa Dokumen Perencanaan/Kajian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditindaklanjuti	6 Dok	Menganalisa dokumen perencanaan kawasan permukiman Kumuh
Melakukan Verifikasi dan Deliniasi pada Kawasan Permukiman Kumuh	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data Luasan Permukiman Kumuh	3 Kab./Kota	Verifikasi & deliniasi Kws. permukiman kumuh

Melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	TARGET	INITIATIVE
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan penataannya	33,40 Ha	Movev pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh
Melaksanakan Peningkatan Kualitas RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Unit RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	115 Unit	Peningkatan Kualitas RTLH dengan Rehab Atap, Lantai & Dinding

Melaksanakan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Kalimantan Selatan	TARGET	INITIATIVE
Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani	9000 m	Movev jalan dan drainase yang ditangani
Melakukan Pendataan PSU Perumahan yang sudah disejahterkan	TARGET	INITIATIVE
Jumlah Dokumen Data PSU Perumahan yang melakukan serah terima	1 Dok	Data PSU Perumahan

**CROSS CUTTING KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PENJELASAN CROSS CUTTING INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Program Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan adalah Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dan Pada Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani, kedua indikator memiliki cross cutting pada kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH dengan lokus berbeda yaitu Bidang Perumahan untuk pemenuhan SPM Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman RTLH dalam kawasan permukiman kumuh provinsi (dengan Luas 10-15 Ha). Tujuan dan sasaran indikator kedua program ini adalah meningkatkan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pada Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani dan Indikator Bidang PSU Permukiman adalah Persentase Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, kedua indikator memiliki cross cutting pada Kegiatan Penanganan PSU Permukiman dan Kegiatan Penataan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kumuh Provinsi. Kedua Penanganan ini memiliki lokus kawasan permukiman, yang didalamnya terdapat kawasan kumuh sehingga kedua indikator ini saling berkontribusi.
3. Pada Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman penanganan kegiatannya adalah salah satu 7 Indikator Kumuh dan Bidang PSU Permukiman penyediaan PSU Permukiman salah satunya adalah 7 Komponen Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman. Kedua Penanganan Bidang ini adalah pekerjaan jalan, kedua jenis pekerjaan ini adalah memberikan dampak dan manfaat pada pemenuhan akses hunian permukiman
4. Indikator Bidang Perumahan dan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mendukung IKU Dinas yaitu Persentase Rumah yang Layak
5. Indikator Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bidang PSU Permukiman mendukung IKU Dinas yaitu Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik
6. Indikator Program pada Bidang Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bidang PSU Permukiman termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Dinas Periode 2021-2026